

**SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DALAM KONSERVASI
MATA AIR SUMBER BRANTAS KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RIZKA FEBRIANI
0810310350**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2012

MOTTO

“I will be success in the world and heaven: Amien”



Kupersembahkan Karyaku ini untuk:

Bersyukur atas segala nikmat dan kebahagiaan yang telah Engkau berikan selama ini kepadaku Ya Allah.. Mudahkanlah segala kesulitanQ menuju masa depan indah Ya Allah dan Tunjukkan Kemudahan seperti orang2 yang telah Engkau Anugrahi Keberhasilan..... Amien

Special to my dad and my mother yang sudah berjuang dalam membiayaiku selama kuliah., semangat dan untaian do'a yang tak pernah ada hentinya untukku... Thanks so much to my parent that I love.... Wish Allah always blessed you... Aku memang belum apa-apa, tapi aku akan buat kalian selalu bangga terhadapku.. Fight to the bright future!!

My sister Arie' dan Suci meskipun kalian menyebalkan., tapi aku sayang kalian.. ☺ buat adek Farrel dan adek Alen., jadilah anak yang berbakti buat ke 2 orang tuamu..

Seseorang dan keluarganya.. Dia yang selalu mendukungku, memberikan semangat dan motivasi agar skripsiku cepat selesai.. thanks for your love... ♡

To my lectures Dr. M. Saleh Soeaidy, MA dan Dr. imam Hanafi, M.Si, Ms terima kasih selama ini sudah membimbingku dengan penuh kesabaran.. Terima kasih juga atas segala nasihat kalian., akan ku ingat selalu... Dan untuk dosen pengujiku yang sukses membuatku nervous sebelum

ujian Fadillah Putra, S.Sos, MP. Aff dan Drs. A. Bambang Barrul Fuad, M.Si tapi ternyata tidak seseram itu hehe... Terima kasih semua saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi saya..

Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi saya., thanks to semua aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, Semua aparatur Pemkot Batu bagian Hukum, Masyarakat Desa Sumberbrantas dan anggota Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH).

All my friends GH.. Mbak Key, Mbak Prut, Mbak Ta, Mbak Opah, Saras, Ima, Krisna, April, Amey dan semua alumni penghuni GH... I love u all

My best friend Priskadini April I dan Priyani Dini... Suka duka telah qt lalui bersama mulai dari semester 1 sampai sekarang... ☺ Memory bersama kalian tidak akan aku lupakan.....

Dan untuk teman-teman Fast Track, Special to "Muti", Erliza, Dhea, Ayu, Vivin, Cempaka, Ilmi, Chandralia, Bayu, Pandu, Fitri, Dini, Priska, Ratna, Tere, Wahyu, Berthi, Nur, Levi, Novi, Erlinda. Mari kita berjuang bersama demi masa depan... Semangat teman-teman ^.^

Semua teman-teman angkatan 2008... Thanks for you all dan aku bahagia bisa mengenal kalian semua...

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam
Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu

Disusun oleh : Rizka Febriani

NIM : 0810310350

Fakultas : Ilmu Administrasi

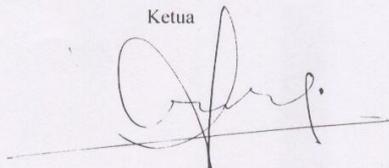
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 23 Februari 2012

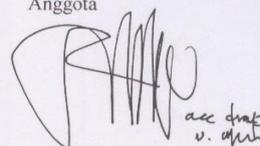
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Socaidy, MA
NIP. 19540212 19803 1 006

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M. Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

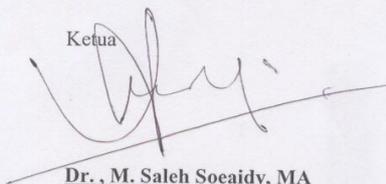
TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 5 Maret 2012
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Rizka Febriani
 Judul : Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu
 dan dinyatakan lulus.

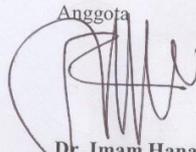
MAJELIS PENGUJI

Ketua



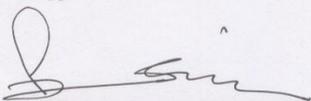
Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



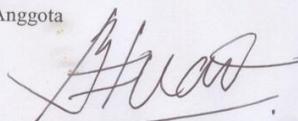
Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms
 NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Fadillah Putra, S.Sos, M.Si
 NIP. 19740627 200312 1 001

Anggota



Drs. A.B. Barrul Fuad, M.Si
 NIP. 19580320 198701 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Februari 2012

Mahasiswa  
99F5CAAF91474291
6000 

Nama : Rizka Febriani

NIM : 0810310350

RINGKASAN

Febriani, Rizka, 2012, Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS 136 Hal + x

Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan pengelolaan sumber daya air yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang terus dilakukan di Kota Batu. Mata air Sumber Brantas merupakan cikal bakal Sungai Brantas yang dimanfaatkan oleh masyarakat di 17 kabupaten/kota Jatim. Oleh karena itu keberadaan mata air ini sangatlah penting. Permasalahan lingkungan terutama sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Bagaimanakah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas kota Batu dan apa sajakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari program-program penghijauan dirumuskan serta diimplementasikan bersama-sama dengan masyarakat. Dan kerjasama ini termasuk dalam kemitraan mutualistik karena antara pemerintah dan masyarakat sama-sama memperoleh keuntungan.

SUMMARY

Febriani, Rizka, 2012, Synergy between the Government and the Society In Brantas Spring Conservation of Kota Batu, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Dr. imam Hanafi, M.Si, Ms 136 Pages + x

This research is conducted based on the water resources management issues which are increasing in line with the continuing development in Kota Batu. Brantas spring is the origin of the Brantas river which is used by people in seventeen district in Jawa Timur. Therefore, the existence of this spring is very important. Environmental problem, especially water resources is a collective responsibility between the government and the society. That is why, the government and the society are necessary to cooperate in the conservation of Brantas spring in order to realize good governance.

How is the synergy between the government and the society in Brantas spring conservation in Kota Batu and what are the supporting and barring factors of the synergy. In this study, researcher uses descriptive study with qualitative approach method.

The result of this study indicate that the synergy between the government and the society in Brantas spring conservation is running well. This is provide by the reforestation programs which are formulated and implemented together with the society. This cooperation is a mutual partnership since both of the government and the society gain advantages.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Minto Hadi, Drs, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA dan Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh pihak terkait yang telah membantu selesainya skripsi saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 24 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTO	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>Governance</i>	12
1. Teori <i>Governance</i>	12
2. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	15
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	16
4. <i>State, Private and Civil Society</i>	18
5. Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat	22
a. Pengertian Kemitraan	22
b. Model-Model Kemitraan	24
6. Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Konversi Mata Air Sumber Brantas	26

7. Organisasi Perangkat Daerah	28
B. Sumber Daya Air	30
1. Gambaran Sumber Daya Air	30
2. Permasalahan Sumber Daya Air	33
3. Daerah Aliran Sungai (DAS)	38
C. Konservasi	40
1. Konsep Konservasi	40
2. Tujuan Konservasi	41
3. Konservasi Mata Air Sumber Brantas	41
D. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu	44
1. Peran Pemerintah dalam Upaya Konservasi Mata Air Sumber Brantas	44
2. Peran Masyarakat dalam Upaya Konservasi Mata Air Sumber Brantas	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	59
G. Keabsahan Data	60
H. Analisis Data	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	63
1. Gambaran Situs Penelitian	63
a. Kondisi Kota Batu	63
b. Kondisi Mata Air Sumber Brantas	65
2. Gambaran Lokus Penelitian	68
a. Pemerintah Kota Batu	68
b. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	71
c. Masyarakat Desa Sumber Brantas	75
d. Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH)	78
3. <i>Governance</i>	80
a. Peran Pemerintah	80
b. Peran Masyarakat	85

c. Sumber Daya Air Kota Batu	89
d. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas.....	90
4. Faktor Pendukung Sinergi yang dijalin antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas	98
5. Faktor Penghambat Sinergi yang dijalin antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas	99
B. Analisis	100
1. Kota Batu	100
2. Mata Air Sumber Brantas	101
3. <i>Governance</i>	105
a. Peran Pemerintah	103
b. Peran Masyarakat	115
c. Sumber Daya Air Kota Batu	119
d. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas	121
4. Faktor Pendukung antara Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas	130
5. Faktor Penghambat antara Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas.....	131
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Tingkat partisipasi masyarakat	52
2	Luas Wilayah Kota Batu 2001	64
3	Profil penduduk Desa Sumberbrantas tahun 2011	77
4	Frekuensi pertemuan KLH Batu dengan pihak terkait dengan Konservasi mata air di Kota Batu	96
5	Tata guna lahan dan kondisi hutan	101
6	Tata guna lahan Kota Batu	102
5	Jumlah sumber mata air di Kota Batu	104



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Peta Kota Batu	65
2	Mata Air Sumber Brantas pertama di Desa Sumber Brantas	68
3	Mata Air Sumber Brantas kedua di Desa Sumber Brantas	68
4	Bagan Struktur Organisasi KLH Batu	73
5	Bagan Struktur Organisasi Desa Sumber Brantas tahun 2011	78
6	Bagan Struktur Organisasi KMPPH	80
7	Terasering di Desa Sumberbrantas	84
8	Strategi Giat Peduli Lingkungan Penguatan Konservasi Hulu Brantas	94
9	Pertemuan Gapoktan dengan warga desa	119



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Blanko responden
2	Daftar pertanyaan wawancara kepada aparat KLH Batu
3	Daftar pertanyaan wawancara kepada aparat Pemkot Batu bagian Hukum
4	Daftar pertanyaan wawancara kepada masyarakat desa Sumberbrantas
5	Daftar pertanyaan wawancara kepada Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH) Kota Batu
6	Lampiran dokumentasi saat wawancara dengan para informan
7	Surat keterangan selesai penelitian dari Pemkot Batu
8	Surat keterangan selesai penelitian dari KLH Kota Batu
9	Surat pengantar penelitian di desa Sumberbrantas
10	Tanda terima pemberitahuan keberadaan ormas KMPPH
11	Daftar susunan pengurus KMPPH
12	Daftar acara pertemuan KLH Batu dengan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Allah SWT yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari semua makhluk hidup terutama manusia karena air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas maupun dibawah permukaan tanah (Sunaryo, 2004:19). Air merupakan sumber daya yang sampai saat ini belum dapat digantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Dewasa ini telah terjadi degradasi air yang cukup berat di beberapa tempat di muka bumi ini, distribusi air terhadap waktu ke waktu semakin timpang dan kualitasnya menurun. Air bukan komoditas yang bisa diciptakan manusia. Dengan teknologi, manusia hanya mampu mengendalikan jumlah dan arah alirannya. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dapat ditransformasikan oleh manusia menjadi bahan baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan penghidupan yang sehat dan produktif, misalnya untuk keperluan rumah tangga, industri, penunjang kegiatan pertanian, usaha perkebunan, perikanan dan pariwisata, serta sumber energi bagi pusat listrik tenaga uap dan tenaga air (Sarwoko dan Ansori, 2006:8). Air sangat dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu

pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air haruslah menjadi prioritas agar sumber daya air dapat kita lestarkan dan kita gunakan baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Arboretum Sumber Brantas atau cikal bakal Sungai Brantas terletak lebih kurang 18 km sebelah utara kota Batu tepatnya di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Brantas ini menyusuri sungai yang mengalir melalui kota Malang, Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya dan bermuara di selat Madura sejauh 420 km. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Jatim di 14 kabupaten/kota. Air yang berasal dari mata air Sumber Brantas ini sangat penting bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sebagai sumber mata pencaharian yang digunakan untuk mengaliri lahan pertanian sampai pada kebutuhan hidup sehari-sehari.

Penebangan hutan liar yang diubah menjadi lahan-lahan pertanian, daerah pemukiman dan perkebunan semakin merajelela. Di beberapa daerah aliran sungai juga terjadi perubahan tata guna lahan yang demikian pesat sehingga luas hutan juga menurun drastis. Semakin berkurangnya hutan di daerah dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air akhirnya berpengaruh pada berkurangnya debit air Sungai Brantas. Akibatnya mata air Sumber Brantas yang berada pada 1580 diatas permukaan air laut itu yang dulunya mampu menghasilkan 12 liter per detik kini hanya 2,5 liter per detik. Tidak hanya itu suhu udara yang sebelumnya 10,22°C kini tidak dingin lagi sebab suhu udaranya hampir mencapai 20°C. Dengan berkurangnya jumlah air di DAS Brantas dan ditunjang meningkatnya

jumlah pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga, pabrik atau pertanian, kini juga menurunkan kualitas air. Pada musim kemarau akan berpotensi sungai-sungai mengering, berkurangnya pasokan air untuk irigasi pertanian, pengolahan air minum dan industri di daerah hilir. Sementara pada musim penghujan akan berpotensi terjadi bencana, seperti banjir dan tanah longsor.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 29, idealnya dari total hutan di DAS minimal terdapat 30 persen berupa hutan lindung atau di DAS Brantas terdapat seluas 450 ribu hektar. Namun, kenyataannya di DAS Brantas luas hutan lindung yang tersisa hanya sekitar 3,42 persen saja atau sekitar 60 ribu hektar. Semakin banyaknya pembukaan lahan baru dengan mengorbankan hutan lindung untuk kepentingan pribadi. Kepentingan kapital seperti pembangunan tempat wisata di Batu, Jatim Park yaitu dengan adanya kolam renang yang mengambil air bawah tanah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat dengan memberikan izin bagi tempat wisata di wilayah Batu untuk menggunakan sumur air bawah tanah sehingga berdampak secara langsung terhadap keberadaan debit sumur air penduduk yang berada di lokasi di bawahnya (Mcdoank, 2010). Simposium Lingkungan pada tanggal 13 September 2006 yang diadakan di Jakarta hasilnya mengatakan bahwa pada tahun 2015 Pulau Jawa akan mengalami krisis air yang sangat serius. Dimana ketersediaan air hanya 30,569 juta m³ per tahun, jauh dibawah kebutuhan air penduduk di Pulau Jawa yang jumlahnya 164,672 juta m³ per tahunnya (<http://lintasjatim.com/daerah>, 2009).

Permasalahan pengelolaan sumber daya air diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ekonomi dan perubahan lahan termasuk dengan adanya isu perubahan iklim. Dalam satu sisi sumber daya air harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, sedangkan disisi lain keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan semakin menurun yang bila dibiarkan akan terjadi kesenjangan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut akan semakin bertambah mengingat kapasitas pengelolaan sumber daya air, seperti kebijakan, manajemen dan koordinasi antar instansi masih ada yang belum berjalan dengan baik. Akibatnya pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, seperti konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air belum dilakukan secara terpadu dan masih berorientasi jangka pendek serta belum melibatkan seluruh *stakeholder* secara berkelanjutan. Pengelolaan DAS Brantas bukanlah pekerjaan yang mudah. Sungai Brantas tidak bisa lagi dikelola secara parsial, tapi perlu komprehensif atau menyeluruh. Segala kegiatan yang dilakukan di daerah hulu juga akan berdampak di daerah hilir. Usaha konservasi perlulah dilakukan oleh segenap pihak yang mendapatkan kontribusi dari DAS Brantas. Menyadari permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air dan mengingat pentingnya aspek-aspek pengelolaan sumber daya air tersebut, diperlukan peran dan kapasitas dalam proses pengelolaan sumber daya air baik secara vertikal maupun horisantal antar sektor (*stakeholder*).

Istilah dan konsep *good governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap pemerintah (*government*) dan

sistem pemerintahan. Pandangan ini timbul disebabkan peran pemerintah dinilai terlalu besar, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006:8). Setelah terjadi reformasi dan politik pada tahun 1998 dengan ditandai oleh tumbangnya rezim pemerintahan orde baru keinginan masyarakat untuk lebih berperan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kehidupan bernegara menjadi semakin luas. Keadaan ini juga nampak dalam persoalan sumber daya air. Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya air ternyata tidak dapat menjamin keinginan masyarakat. Dan Undang-Undang No. 11/1974 juga tidak dapat mengatur pengelolaan sumber daya air secara sepadan sehingga banyak sekali kasus-kasus yang memberikan contoh tentang buruknya kondisi sumber daya air di Indonesia. Dalam setiap kebijakan, Undang-Undang maupun peraturan perlu mendengar aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan berbagai kebijakan pemerintah. Perhatian terhadap keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep *good governance*.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum mampu untuk mewujudkan peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan. Dalam penggunaan air yang disertai dengan konservasi hampir tidak ada, sehingga para pengguna air hanya memberikan kontribusi berupa retribusi saja dan tidak menyentuh upaya penyelamatan kalau sumber-sumber air hanya "dikuras" tanpa ada upaya penyelamatan melalui konservasi, maka tidak lama lagi di Malang Raya akan

terjadi krisis air. Memperhatikan permasalahan yang kompleks dan kondisi yang parah dari sumber daya air saat ini, Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang diharapkan dapat memenuhi tujuan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum atas pengelolaan sumber daya air, baik air permukaan, air bawah tanah, maupun air di atas permukaan,
2. Membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keadilan seluruh masyarakat,
3. Sebagai landasan sistem pengelolaan sumber daya air yang seimbang antara eksploitasi (pendayagunaan) dan konservasi (pelestarian),
4. Sebagai landasan sistem pengelolaan sumber daya air terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi,
5. Membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang demokratis, transparan, serta mengakomodasi peran masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 7/2004 Pasal 12 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber mata air bisa dieksploitasi tapi juga dipikirkan konservasinya. Permasalahan lingkungan terutama sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama, baik pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Apabila pemerintah dan masyarakat bekerjasama dengan baik, maka akan lebih maksimal dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Dari kerjasama yang dijalin antara pemerintah dan masyarakat akan dapat mewujudkan *good governance*.

Salah satu prinsip yang mencerminkan *good governance* adalah partisipasi

masyarakat dalam berbagai aktivitas pemerintah. Jadi, *good governance* terwujud dan lingkungan juga terjaga. Dari permasalahan yang ada dapat dilihat bahwa air merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Guna mendapat sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan sumber daya air, maka judul dari penelitian ini adalah **“Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam sinergi yang dijalin antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan bagaimana *Good Governance* yang dijalankan dalam rangka pelestarian sumber daya air.

2. Secara Praktis

Masukan kepada pemerintah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai pelestarian lingkungan terutama sumber daya air.

- a. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya bidang sumber daya air serta sebagai sumbangan informasi bagi peneliti lainnya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.
- b. Menjadi bahan referensi bagi pemerintah agar lebih responsif lagi dalam menangani permasalahan lingkungan terutama sumber daya air.
- c. Mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap pentingnya sumber daya air.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu

susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari lima sub bab. Pertama akan menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diketengahkan sebagai acuan dalam membahas permasalahan yaitu tentang *Good Governance, State, private and civil society*, Sumber Daya Air, Konservasi, Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Pertama, mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian yang

meliputi bentuk peran pemerintah, peran masyarakat, kemudian sinergi yang terjalin diantara keduanya. Fokus berikutnya adalah mengenai faktor penghambat dan pendukung dari sinergi tersebut.

Ketiga, lokasi dan situs penelitian dilaksanakan yaitu Kota Batu tepatnya di Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, Pemkot Batu bagian Hukum, masyarakat Desa Sumber Brantas dan Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya yang meliputi buku catatan, alat tulis dan alat bantu. Ketujuh, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub bab, dimana sub bab pertama akan menguraikan tentang gambaran umum Kota Batu dan kondisi mata air Sumber Brantas. Sub bab kedua akan menguraikan penyajian data yang meliputi bentuk peran pemerintah dalam upaya konservasi, peran masyarakat dalam konservasi, kemudian sinergi yang terjalin diantara keduanya. Berikutnya mengenai faktor penghambat dan pendukung dari sinergi tersebut.

Sementara sub bab yang ketiga akan menguraikan pembahasan tentang bentuk sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi

mata air Sumber Brantas. Dalam sub bab ini, akan menguraikan mengenai penyajian data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipih sesuai tema penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ditarik dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya sumber daya air pada umumnya dan mata air Sumber Brantas khususnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Governance*

1. Teori *Governance*

Paradigma manajemen publik baru dalam implementasinya ternyata masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini selanjutnya mendorong munculnya aneka kritik yang pada gilirannya melahirkan konsep baru yang lebih populer disebut dengan *governance*. Kata *governance* berasal dari kata dasar “*govern*” yang artinya memerintah (*a country*), menentukan (*a decision*), berpengaruh atas (*a grammatical case*) (Rewansyah, 2010:79). *Government* dengan *governance* merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun kata asalnya sama yaitu *to govern*. Hubbard (2001) yang dikutip oleh Rewansyah (2010:82) mengatakan bahwa “*Governance is more than Government*”. Kemudian istilah *governance* didefinisikan sebagai “*how society steer themselves*”.

Good Governance merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh *World Bank* pada Tahun 1994. *World Bank* (Bank Dunia) sendiri mendefinisikan *governance*, “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” (cara menggunakan kekuasaan negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan) (*World Bank* dalam Rewansyah, 2010:81).

Konsep *governance* dalam bahasa Inggris berarti perbedaan mendasar antara *government* dan *governance* dengan demikian pada dasarnya lebih terletak pada aspek prosesnya (*styles of governing*) dan bukan pada outputnya. Seperti

ditegaskan Sammy Finer (1970) dalam (Winarso, 2004:4) yang mendefinisikan *governance* sebagai :

- a. Aktivitas atau proses memerintah;
- b. Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan;
- c. Orang-orang yang diberikan tugas memerintah atau pemerintah;
- d. Cara, metode atau sistem dimana masyarakat tertentu diperintah

Pendapat lain menyatakan bahwa *governance* adalah “*the act, fact, manner of governing*” yang berarti tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Suhady dan Fernanda, 2005:31). Sedangkan Kooiman dalam (Basuki dan Shofwan, 2006:8) *governance* merupakan “.....serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah manajemen pemerintahan dan pembangunan yang bersih, demokratis, berorientasi pada ekonomi pasar sosial yang berkeadilan, menuju terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) melalui pengaturan pola hubungan yang sinergis antara sektor publik, swasta/dunia usaha dan kelembagaan masyarakat. Institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state, privat sector and society* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

- a. *State* (negara). Konsepsi dari pemerintahan ini pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*civil society organizations*). Pengertian *state* dalam hal ini mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan

untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan yang baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- b. *Private* atau sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam berinteraksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, termasuk juga kegiatan sektor formal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.
- c. *Civil Society*. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara mobilisasi (Suhady dan Fernanda, 2005:37).

Penggunaan konsep *governance* ini yakni masing-masing pihak melakukan manajemen upaya masing-masing untuk memastikan terpenuhinya kepentingannya. Yang dikedepankan dalam proses *governance* bukan efisiensi atau efektifitas kerjanya melainkan pola interaksi pihak-pihak yang berkepentingan. Kinerja masing-masing pihak yang mengembangkan manajemen ini dikondisikan oleh pola interaksi yang terjadi. Dalam hal ini kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas, peran pemerintah lebih menonjol dibandingkan dengan peran masyarakat atau sering disebut sebagai *governmentality*. *Governmentality* adalah konsep yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf Michel Foucault Perancis sekitar tahun 1977.

Governmentality dapat dipahami sebagai:

- a. *The way governments try to produce the citizen best suited to fulfill those governments' policies,*
- b. *The art of government,*
- c. *Governmental rationality*
- d. *The techniques and strategies by which a society is rendered governable* (www. wisegeek.com, 2008)

Teori *governmentality* menjelaskan mengenai bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat, namun masih adanya peran pemerintah yang lebih menonjol. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun otoritas kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan ada di tangan pemerintah. Peneliti tetap menggunakan teori *good governance* untuk menganalisis bagaimana hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Karena dalam *good governance* menuntut adanya interaksi-interaksi yang dapat membangun rasa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Pilar-Pilar *Good Governance*

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Sinambela (2006:48) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance* yaitu:

- a. Negara atau pemerintah
 - 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
 - 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
 - 3) Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;
 - 4) Menegakkan hak asasi manusia;
 - 5) Melindungi lingkungan hidup;
 - 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

b. Sektor swasta

- 1) Menjalankan industri;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan;
- 4) Meningkatkan standar hidup karyawan;
- 5) Memelihara lingkungan hidup;
- 6) Menaati peraturan;
- 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
- 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM;

c. *Civil society* atau masyarakat madani

- 1) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
- 2) Mempengaruhi kebijakan publik;
- 3) Sebagai sarana *check and balance* pemerintah;
- 4) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia;
- 6) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dan nilai *good governance* dapat diadopsi dalam rangka itu pengembangan dan penerapan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam konservasi mata air Sumber Brantas dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. *United Nation Development Programme* (UNDP) menetapkan sembilan karakteristik dari *good governance* diantaranya adalah:

- a. Partisipasi (*participation*), mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Penegakan hukum (*rule of law*), mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Transparansi (*transparency*), menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan manjamen kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Responsivitas (*responsiveness*), meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- e. Wawasan ke depan (*visionary*), membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- f. Keadilan (*equity*), pemerintahan yang baik akan memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam upaya mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- g. Efisiensi dan efektifitas (*efficiency and effectiveness*), menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

- i. Profesionalisme (professionalism), meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah dan cepat dengan biaya yang terjangkau.
- j. Pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat (Basuki dan Shofwan, 2006:12).

Prinsip-prinsip *Good Governance* Versi *Partnership*:

- a. Partisipasi: tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Fairness: kondisi dimana kebijakan dan program yang diambil dalam *governance* diberlakukan secara adil (tanpa diskriminasi) kepada siapapun tanpa memperhatikan status, ras, agama dan jenis kelamin.
- c. Akuntabilitas: kondisi di mana pejabat publik yang ditunjuk atau dipilih bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya dan responsif terhadap permintaan publik.
- d. Transparansi: kondisi dimana keputusan yang diambil pejabat publik jelas dan terbuka bagi masyarakat untuk menyaksikan, mempelajari dan mengevaluasi.
- e. Efisiensi: kondisi dimana kebijakan dan program yang diambil telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal
- f. Efektivitas: dimana tujuan dari kebijakan dan program (*output*) tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan (amanat konstitusi masyarakat yang cerdas, sejahtera, adil dan beradab menjadi parameter).

4. *State, Private and Civil Society*

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pengelolaan kepentingan publik, baik dalam tatanan teoritis maupun praktis membawa dampak terhadap

pengelolaan tata pemerintahan. Perubahan paradigma ini adalah konsep dari *government* ke *governance* yang lebih menekankan orientasi administrasi publik yang saat ini sedang diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan rakyat. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintah (*government*) akan tetapi beralih kepada aspek tata pemerintahan (*governance*). *Governance* mempunyai tiga domain yaitu *state, private and civil society*. Ketiga domain tersebut sering juga disebut sebagai pilar *good governance* yang saling berinteraksi satu sama lain baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama. Apabila interaksi dari ketiga pilar ini berjalan dengan tidak baik maka akan terjadi konflik, sebaliknya apabila interaksi antara *state, private and civil society* berjalan dengan baik maka akan terjadi kerjasama (Agus Mandar *et al*, 2004:46).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab bisa tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur antara *state, private and civil society* memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang baik bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi serta tata aturan yang jelas dan pasti. *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Terdapat 4 (empat) pertimbangan pokok untuk menggalang kerjasama antara sektor publik dan swasta atau masyarakat.

- a. Kriteria kelembagaan
- b. Kriteria ekonomi dan financial
- c. Kriteria produk layanan

d. Kriteria prosedur dan mekanisme layanan

Dari perspektif kesisteman, penyempurnaan manajemen pemerintahan melalui pengembangan kerjasama kemitraan dengan swasta/masyarakat harus mampu membawa perubahan budaya kerja dari birokratisme menjadi korporatisme. Ini artinya, reformasi pemerintahan hanya dapat dikatakan berhasil jika mampu menghasilkan *hallo-effect* terhadap perilaku birokrasi. Dalam hal ini, proses perubahan perilaku yang diharapkan meliputi perubahan dari pola manajemen gotong royong menjadi renumerasi, dari paternalistis menjadi rasionalistis, dari orientasi kolektivitas menjadi penghargaan terhadap eksistensi dan peran individu, dari otoriter menjadi demokratis, dari sentralistis menjadi desentralistis, dari tertutup menjadi terbuka, dari kaku menjadi luwes, dari birokratis menjadi debirokratis, dari “*government*” menjadi “*governance*”, serta dari “*bad governance*” menjadi “*good governance*” yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani. Perubahan perilaku birokrasi adalah sebuah keniscayaan dalam era otonomi luas dewasa ini. Sebab, sebaik apapun format kelembagaan jika tidak ditunjang oleh perilaku yang berorientasi pada pelayanan publik, tetap tidak akan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi (Utomo, 2008).

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, pemerintah yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sulit diharapkan secara sadar dan sukarela akan berubah menjadi bagian yang efektif dari *good governance* Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan *good governance* dalam menuju Indonesia masa depan

harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan *civil society* untuk memperbesar partisipasi berbagai warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam tatanan pemerintahan yang demokratis seperti yang disinggung di depan, komponen *civil society* harus memperoleh peran utama. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya di tangan pemerintah, melainkan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, peran rakyat oleh administrasi publik difasilitasi berada pada posisi yang menentukan dalam konstelasi keseimbangan tersebut. Paling tidak hubungan kesejajaran itu bisa diwujudkan dari ketiga komponen tersebut

Dalam *Pathways to Democracy, The Political of Democratic Transitions*, James F. Hollifield dan Calvin Jilson mengutarakan bahwa semua transformasi menuju demokrasi memerlukan tiga syarat: (1) pengutamaan kembali hak-hak individu, yang indikator utamanya ialah pemilihan umum yang merdeka dan adil; (2) pasar bebas yang memerlukan persaingan, *rule of law*, dan kebebasan informasi; dan (3) bangkitnya masyarakat warga yang dirumuskannya sebagai “*a dynamic realm of associations and groups that are autonomous from the state*” (Hollifield dan Jilson, 2000:4)

Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep *civil society* adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional). Secara politis, melalui konsep *civil society* dapat diciptakan bentuk hubungan yang lebih simetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa tetapi masyarakat lemah maka proses demokratisasi akan *stagnant* atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep *civil*

society dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat didalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi kepemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui *civil society* dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara *individual participation*. Diyakini keterlibatan *civil society* merupakan komponen yang menentukan kualitas *governance*.

Perjuangan untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai antara aparat pemerintah dengan masyarakat yang lebih luas membutuhkan adanya tujuan jangka pendek dan jangka menengah untuk meyakinkan partisipan bahwa adanya kepercayaan satu sama lain akan memberikan manfaat dan perasaan yang lebih baik, disamping perlunya menyediakan transparansi untuk memperkuat kepercayaan tersebut (Sumarto, 2009:xix). Bagian dari upaya demokratisasi adalah untuk membangun institusi yang dapat bekerjasama dan mengembangkan partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan *good governance*. Dalam menciptakan suasana *good governance* dalam suatu negara, hendaknya hubungan yang terjalin antara ketiga sektor berjalan dengan baik. Namun dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ini, pilar-pilar *good governance* akan difokuskan pada dua sektor saja yakni pemerintah dan masyarakat. Dikarenakan kedua sektor ini memiliki peran yang besar terhadap pelestarian sumber daya air. Pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat secara

luas sebagai pengguna dari sungai Brantas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

a. Pengertian Kemitraan

Menurut Sulistyani (2004:129) dalam Marsiatanti (2011:52) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ada dua pihak atau lebih
- 2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- 3) Ada kesepakatan
- 4) Saling membutuhkan

Kemitraan yang dijalankan akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan, beberapa hal yang akan dihasilkan dari proses kemitraan antara lain:

- 1) Meningkatkan sumber daya
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
- 3) Mengintegrasikan antara sektor publik dengan sektor swasta serta masyarakat untuk memerangi ketidakadilan

- 4) Untuk mereformasi pelayanan sehingga sehingga lebih responsif terhadap konsumen
- 5) Untuk mencapai proses kebijakan yang lebih fleksibel
- 6) Untuk membangun kapasitas lokal untuk tindakan dan kontrol oleh masyarakat setempat dan pemangku kepentingan
- 7) Untuk menghindari konflik, membuat keyakinan dan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Shapira, 2009:35)

Jadi, tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dalam hal ini kaitannya dengan melestarikan mata air Sumber Brantas adalah ke dua pihak saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra yaitu pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan dan merugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan baik dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat diperlukan kemitraan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra dengan visi atau misi yang berbeda asalkan tetap saling mengisi dan melengkapi secara fungsional.

b. Model-Model Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan banyak cara, sehingga muncul ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan. Kemitraan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- 2) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
- 3) *Conjuntion partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan (Sulistiyani, 2004:129 dalam Marsiatanti, 2011: 56)

Kemitraan semu adalah merupakan suatu kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman Orde Baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari, oleh pemerintah, dan untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi/kelompok atau lebih yang memiliki yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya. Pemikiran kemitraan yang demikian ini diasopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara burung dengan kerbau dalam kehidupan binatang.

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok ataupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

c. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan atau operasi bersama. Sinergi berasal dari kata *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Selanjutnya bersinergi berarti melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama ini tentunya memerlukan koordinasi yang baik, perasaan saling memberi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang telah disepakati bersama (Podungge, 2009:47). Hanya dengan bekerja bersama-sama tujuan dapat tercapai dengan baik.

Pemerintah, swasta maupun masyarakat apabila terlibat dalam sinergi harus menerapkan beberapa prinsip dasar berikut agar sinergi yang dibentuk bisa memberikan hasil yang optimal, yaitu:

1) Kesiediaan untuk saling berbagi

Dengan saling berbagi ide, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman maka sinergi bisa dilakukan. Dari sinilah kekuatan dari sinergi itu dapat ditemukan.

Tanpa kesediaan saling berbagi, maka sinergi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pelestarian mata air Sumber Brantas pemerintah tentunya memiliki strategi tersendiri, begitu juga dengan masyarakat yang mengetahui secara mendalam mengenai mata air Sumber Brantas karena sebagai pengguna air untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga jika keduanya disatukan akan diperoleh sebuah kebijakan yang akan menguntungkan pihak pemerintah maupun masyarakat.

2) Berfikir Menang

Dalam bersinergi tidak ada pihak yang harus kalah ataupun pihak yang dirugikan. Semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergi semua pihak harus saling berpikir positif agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tanpa suatu beban yang berarti. Antara pemerintah dan masyarakat harus dalam posisi yang sejajar/horisontal. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan, namun tetap saja masyarakat juga harus diberikan ruang untuk turut berpartisipasi terutama dalam hal konservasi mata air Sumber Brantas sehingga pemerintah tidak semena-mena dalam mengambil keputusan.

3) Menghargai Perbedaan

Dalam bersinergi harus dapat menghargai perbedaan satu sama lain, dengan perbedaan inilah sinergi tersebut ada. Pemerintah dan masyarakat adalah dua golongan yang berbeda, namun bukan berarti pendapat masing-masing patut

dipertahankan secara egois, perlu adanya sikap saling menghargai. Terlebih dari perbedaan fungsi masing-masing lembaga, sehingga dengan perbedaan tersebut sebuah kerjasama dapat dilakukan agar memperoleh *'the best way'* melalui ide kreatif bersama dalam melaksanakan tujuan.

Hubungan kemitraan harus dijalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Apabila pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya air secara sendiri, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Mengingat permasalahan lingkungan terutama sumber daya air sudah sangat kompleks dan krusial. Pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Jadi upaya pelestarian sumber daya air disini akan lebih berjalan dengan sempurna apabila pemerintah dan masyarakat mampu bekerjasama dengan baik. Dengan adanya kemitraan tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas dapat teratasi dengan tepat dan antara pemerintah dan masyarakat memiliki rasa peduli terhadap keselamatan sumber daya air.

6. Organisasi Perangkat Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (www.wikipedia.org, 2008). Pembentukan organisasi perangkat daerah dibentuk

oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Selanjutnya rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari:

- a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat;
- b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
- c. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
- d. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
- e. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas terdiri dari 1 bagian tata usaha dan 4 bidang, bagian tata usaha terdiri 2 sub bagian dan bidang terdiri dari 2 seksi. Badan terdiri dari 1 bagian tata usaha dan sebanyak-banyaknya 3 bidang, bagian

tata usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 sub bagian dan bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 sub bidang. Kantor terdiri 1 sub bagian tata usaha dan sebanyak-banyaknya 3 seksi.

Kota Batu terdapat beberapa dinas, badan dan kantor. Salah satu kantor yang mempunyai kewajiban dalam menangani permasalahan lingkungan adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu (KLH). Landasan hukum institusi ini berdasarkan Perda Kota Batu No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah kota Batu. KLH Kota Batu termasuk lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah.

B. Sumber Daya Air

1. Gambaran Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya (Sunaryo *et al.*, 2004:19). Karakteristik sumber daya air dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu aspek topografi dan geologi, keragaman penggunaannya, keterkaitannya (hulu-hilir, kualitas-kuantitas), waktu dan siklus alaminya. Dari faktor topografi dan geologi, sumber daya air dapat bersifat lintas wilayah administrasi. Keragaman penggunaan air yang bervariasi seperti digunakan untuk pertanian, keperluan industri, untuk pembangkit listrik ataupun keperluan perikanan. Dengan demikian

kuantitas dan kualitas air sangat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah musim yang terjadi di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan, sedangkan siklus alami yaitu sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi kependudukannya.

Beberapa karakteristik dasar sumber daya air dinyatakan antara lain oleh aliran yang dapat mencakup wilayah administratif sehingga air sering kali disebut sebagai sumber daya dinamis yang mengalir (*dynamic flowing resource*). Oleh karena sifat air yang mengalir, maka dengan sendirinya antara hulu-hilir, kualitas-kuantitas, air bawah tanah-air permukaan satu sama lain saling berkaitan. Bahwasannya air memerlukan sifat kelanggengan ketika terus menerus digunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan makhluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional yang harus dikelola secara bijaksana dan profesional.

Tri M. Sunaryo *et al* (2004), dalam bukunya *Pengelolaan Sumber Daya Air* menuliskan beberapa pandangan dunia tentang sumber daya air diantaranya adalah:

- a. Dalam konferensi *The Dublin statement (International Conference on Water and the Environment)* yang diadakan di Dublin, 26-31 Januari 1992 menyatakan bahwasannya “Air merupakan bagian penting dari lingkungan dan merupakan wadah bergantungnya berbagai bentuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kelangkaan dan penyalahgunaan air bersih akan

menghadapi ancaman yang serius dan makin bertambah terhadap pengembangan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konferensi ini ditetapkan empat butir tentang keputusan mengenai sumber daya air, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sumber daya air harus didasarkan atas pendekatan holistik, sekaligus mengaitkan pembangunan sosial dan ekonomi dengan perlindungan ekosistem
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada pendekatan partisipatif, yang melibatkan pengguna, perencana dan pembuat kebijakan pada semua tingkat
 - 3) Masyarakat memegang peranan yang sama pentingnya dengan para pembuat kebijakan untuk mengelola dan perlindungan terhadap sumber daya air
 - 4) Air mempunyai nilai ekonomi dan harus dipandang sebagai *economic good*
- b. Dalam konferensi *South East Asia Technical Advisory Committee (SEATAC) workshop Global Water Partnership (GWP)* yang diadakan di Manila, 11-14 Januari 2000 merumuskan visi air untuk Asia Tenggara: “Sumber daya air yang lestari untuk memastikan pemenuhan kuantitas air dengan kualitas yang diperlukan rakyat demi kesehatan, keamanan pangan, kelayakan ekonomi dan rencana kerja dalam bidang sumber daya air untuk kawasan Asia Tenggara mencakup usaha-usaha berikut:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien

- 2) Mengembangkan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu
 - 3) Bergerak menuju pelayanan air yang memadai dan terjangkau
- c. Dalam konferensi *Second World Water Forum and Ministerial Conference* yang diadakan di Den Haag, Belanda 20-22 Maret 2000 menyatakan “Visi air dunia: Menjadikan air urusan setiap orang”. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Den Haag yang ditanda tangani para Menteri sedunia mendeklarasikan bahwa untuk mencapai keterjaminan air dihadapi tujuh tantangan yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan pokok penduduk
- 2) Menjamin penyediaan pangan
- 3) Melindungi ekosistem
- 4) Membagi sumber daya secara adil antar wilayah yang berkaitan
- 5) Menanggulangi resiko akibat ancaman ketersediaan air
- 6) Memberi nilai terhadap air
- 7) Menguasai air secara bijaksana

Sumber daya air sangat dibutuhkan dan dipergunakan di seluruh dunia, karena air merupakan sumber penghidupan bagi kehidupan makhluk. Air mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pembangunan, pertahanan dan keamanan (Biasanya sebuah negara menggunakan benteng-benteng yang dikelilingi oleh air). Keberadaan sumber daya air harus senantiasa dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat terus terjaga kelestariannya.

2. Permasalahan Sumber Daya Air

Dalam Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang sumber daya air Tahun 2005 disebutkan beberapa permasalahan sumber daya air diantaranya adalah:

- a. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu.

Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan Negara ke lima terbesar di dunia dalam hal ketersediaan air. Namun, secara alamiah Indonesia menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun secara waktu sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan baik dalam perspektif jumlah maupun mutu. Dari segi spasial pulau jawa yang dihuni sekitar 65% penduduk Indonesia hanya mempunyai sekitar 4,5% dari potensi air tawar nasional. Dari segi distribusi waktu sepanjang Tahun, 80% air tersedia pada musim hujan yang biasanya berdurasi lima bulan, sedangkan 20% lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi waktu selama tujuh bulan. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau juga dapat menimbulkan potensi kekeringan yang berkepanjangan.

- b. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah

Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan yang secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Banyak sekali penebangan hutan secara illegal dan pengalihan lahan hutan menjadi perkebunan. Jika hutan menjadi gundul maka tidak ada yang bisa menjadi daerah resapan air, sedangkan jika hutan diubah menjadi lahan perkebunan maupun perkebunan maka fungsi dalam menahan air juga berbeda. Dan lahan pertanian dan kawasan pedesaan berubah dengan cepat menjadi kawasan industri dan perkotaan. Dampak lanjutan kelangkaan air yang terjadi akan mendorong pola penggunaan air secara tidak bijaksana, seperti pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan menurunnya kualitas air tanah.

c. Menurunnya kemampuan penyediaan air

Seiring dengan semakin berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah mengakibatkan menurunnya area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Hutan mempunyai fungsi menyerap air melalui proses fotosintesa dan menyimpannya dalam perakaran dalam tanah.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara keberadaan hutan dengan jumlah titik sumber mata air. Dengan berkurangnya hutan diikuti pula dengan berkurangnya jumlah titik mata air.

d. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan

Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran

masyarakat dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis sumber daya. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonomi telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien. Pada sisi masyarakat sendiri, tingkat kesadaran dan partisipasi masih rendah.

e. Konflik antar pengguna, penggunaan dan daerah administratif

Persediaan air permukaan di kawasan Asia Tenggara berada di sekeliling khatulistiwa sangat dipengaruhi oleh faktor iklim yang mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dimusim hujan jumlah air cenderung berlebihan sementara di musim kemarau persediaan air justru menurun. Selain kuantitas, kualitas airpun ikut berpengaruh. Dalam perspektif demikian, konflik antar pengguna dan penggunaan secara pribadi dapat berkembang. Contoh konflik yang timbul adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat menyebabkan penyediaan air menjadi penting bagi kelayakan hidup masyarakat. Ketersediaan air permukaan selalu berubah-ubah, tergantung kepada musim dan kemampuan mengelola prasarana pengendalian air. Pasokan air untuk irigasi cenderung berkurang karena digunakan untuk keperluan lain seperti industri dan keperluan domestik. Semakin terbatasnya ketersediaan air irigasi akan memicu konflik antara petani di bagian hilir dan bagian hulu. Sungai yang melintasi lebih dari satu wilayah administratif seperti kabupaten atau kota selalu memiliki potensi konflik.

f. Kelangkaan alokasi air

Untuk daerah pengaliran sungai dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, air permukaan dan air bawah tanah telah mencapai titik krisis maksimum. Hal ini tampak jelas terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Penggunaan air yang berlebihan tanpa adanya regenerasi telah membuat air terus mengalami degradasi dari waktu ke waktu.

g. Lingkungan sungai

Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak dapat dipisahkan. Dengan sendirinya pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan. Namun sayangnya aspek tersebut sering diabaikan (baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan) sehingga orientasi kolektif terhadap pelestarian aspek lingkungan sungai masih sangat rendah. Contoh kecil yaitu praktek-praktek membuang sampah ke perairan terbuka merupakan bukti dari sikap meremehkan kelestarian sumber daya air.

Di sisi yang lain tingkat pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi dan pembangunan ekonomi yang signifikan juga membuat kebutuhan air semakin meningkat. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga semakin berdampak pada memburuknya kondisi hutan. Semakin berkurangnya hutan di dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air berpengaruh terhadap debit sungai Brantas. Kebutuhan air bersih ini mengalami penurunan drastis secara kualitas maupun kuantitas dari hulu ke hilir. Dapat dikatakan bahwa faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup namun

tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, seperti perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Bencana banjir, longsor dan kekeringan yang merupakan bukti dari degradasi lingkungan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dimaksud dengan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan sebagai satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Untuk memudahkan pengembangan dan pengelolaannya, DAS dikelompokkan dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS). Berdasarkan letak geografis DAS dan cakupan pelayanan tingkat strategisnya, wilayah sungai dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Wilayah sungai kabupaten/kota merupakan daerah aliran sungai yang secara geografis berada dalam suatu kabupaten/kota. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
- b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota merupakan daerah aliran sungai yang secara geografis melewati lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah provinsi.
- c. Wilayah sungai lintas provinsi merupakan wilayah sungai yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah provinsi. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah pusat.
- d. Wilayah sungai lintas Negara merupakan wilayah sungai yang secara geografis melewati lebih dari satu Negara. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah.
- e. Wilayah sungai strategis nasional merupakan wilayah sungai yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan nasional. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah. (Sunaryo *et al*, 2004:32)

Secara tradisional, air yang mengalir dari sumber-sumber air di pegunungan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti masak, minum, mandi dan mencuci. Air yang mengalir jernih dari mata air tersebut juga mengalir ke sungai-sungai kecil yang dimanfaatkan penduduk untuk mengairi lahan pertanian mereka. Tidak hanya itu, wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis yang juga dimanfaatkan sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri dan lain-lain. DAS Brantas di Jawa Timur mempunyai panjang 320 km dan memiliki DAS seluas 12.000 km² yang mencakup kurang lebih 25 % luas propinsi Jawa Timur. Brantas ini menyusuri sungai yang mengalir melalui kota Malang, Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya dan bermuara di selat Madura sejauh 420 km. Kerusakan DAS menyebabkan kemampuan lahan menyimpan air menjadi berkurang sehingga air hujan yang jatuh tidak dapat ditahan oleh tanah dan langsung dialirkan kembali ke laut.

Masalah banjir dan kekeringan merupakan dampak dari sistem tata air di wilayah DAS yang buruk. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi hutan di bagian hulu DAS Brantas yang semakin berkurang jumlahnya. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS yaitu dari segi fungsi tata air. Sehingga aktifitas perubahan tata guna lahan yang dilaksanakan di daerah hulu DAS tidak hanya akan berpengaruh dimana kegiatan tersebut berlangsung (hulu DAS) tetapi juga akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan

transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran air lainnya Asdak, (1995) dalam (Nurfatriani, 2009:242).

C. Konservasi

1. Konsep Konservasi

Istilah konservasi menurut Suharti (2004:35) berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata “con” (“together”) dan “servare” (“keep/save”) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Konsep pembangunan yang berkelanjutan menjadikan konservasi sumber daya alam sebagai pusat perhatian. Konsep dasar konservasi air adalah jangan membuang sumber daya terutama sumber daya air. Pada awalnya konservasi air diartikan sebagai menyimpan air dan menggunakannya untuk keperluan yang produktif dikemudian hari. Perkembangan selanjutnya konservasi lebih mengarah kepada pengefisienan penggunaan air.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (Sunaryo *et al*, 2004:51).

2. Tujuan Konservasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 3 menyebutkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Tujuan utama konservasi menurut Strategi Konservasi Sedunia (*World Conservation Strategy*) ada tiga, yaitu:

- a. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan,
- b. Mempertahankan keanekaragaman genetik,
- c. Menjamin pemanfaatan jenis (spesies) dan ekosistem secara berkelanjutan (Iskandar, 2000:5).

Tujuan dari konservasi secara umum adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

3. Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Konservasi sumber daya alam sangat penting untuk dilakukan terutama konservasi tentang sumber daya air. Mata air Sumber Brantas yang merupakan cikal bakal dari Sungai Brantas harus benar-benar dipikirkan keselamatan dan kelestariannya. Dari kurun waktu yang tidak lama beberapa mata air sudah hilang. Rusaknya alam dan minimnya resapan air di wilayah hulu, berakibat berkurangnya jumlah mata air Sungai Brantas. Tingginya kegiatan penebangan pohon dan banyaknya pembukaan lahan pertanian baru membuat berkurangnya wilayah resapan air. Akibatnya, beberapa mata air mulai mengering. Direktur Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Surabaya, Prigi Arisandi mengatakan, hasil survei Ecoton bersama *Intenational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Ecosystem-Grant Programme (EGP)* Belanda, kawasan resapan air hulu Brantas banyak yang hilang akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan penyusutan jumlah mata air. Data Ecoton menyebutkan, sumber mata air terbesar Sungai Brantas di Kota Batu, berkurang 50% dalam dua Tahun terakhir. Sebanyak 11 mata air mengering sedangkan 46 mata air lainnya mengalami penurunan debit dari 10 m³/detik menjadi kurang dari 5 m³/detik. (<http://wartapedia.com>)

Lingkup kegiatan pengelolaan yang optimal dalam rangka menjaga kelestarian sumber-sumber mata air terutama mata air Sumber Brantas, dapat dilakukan dalam beberapa bidang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air yaitu:

- a. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (*watershed management*) untuk dapat menjaga fungsi daerah resapan air yang dilakukan melalui usaha-usaha konservasi sumber daya air seperti penghijauan, pengendalian erosi, serta pengendalian tata guna lahan. Kegiatan manajemen daerah tangkapan hujan ini seperti misalnya:
 - 1) Penyiapan suatu rencana induk konservasi air yang melibatkan instansi yang terkait dan juga penyertaan partisipasi masyarakat dalam berbagai program mulai dari perencanaan juga implementasinya.
 - 2) Menyusun program Tahunan bersama instansi yang terkait berdasarkan rencana induk konservasi yang telah disepakati bersama.
- b. Pengelolaan lingkungan sungai (*river environment management*) untuk menjaga fungsi sumber air yang dilakukan melalui pengendalian penggunaan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan biota air dan wisata air. Manajemen pengelolaan sungai ini seperti misalnya melakukan penertiban penggunaan lahan.
- c. Pengelolaan kuantitas air (*water quantity management*) untuk menyediakan air secara adil dan transparan melalui kegiatan penetapan perijinan penggunaan air, alokasi air, serta pengendalian distribusi air.
- d. Pengelolaan kualitas air (*water quality management*) untuk menjaga kualitas air pada sumber-sumber air sesuai peruntukan yang ditetapkan melalui kegiatan pengendalian kualitas air, penetapan ijin pembuangan limbah cair serta pengendalian pencemaran air. Kegiatan ini dapat dilakukan seperti misalnya secara periodik melakukan pemantauan kualitas air, melaksanakan

pengujian laboratorium, melakukan evaluasi, serta memberi rekomendasi kepada pemerintah provinsi dan instansi agar dapat digunakan sebagai dasar penegakan aturan dan pembinaan kualitas air sungai.

- e. Penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan mengupayakan inovasi, baik dibidang teknologi maupun sistem manajemen. Keadaan sumber daya air di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, lingkungan alam sekitarnya dan cuaca global yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara terus menerus khususnya dalam bidang teknologi dan manajemen. (Sunaryo *et al*, 2004:55-67)

D. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas Kota Batu

1. Peran Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator, regulator dan pengawas yang dipresentasikan oleh instansi-instansi sektoral pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka otonomi daerah terdapat dua tugas pokok pemerintahan daerah yaitu, pertama menggali dan memanfaatkan sumber daya (manusia, alam, uang, sentra industri dan ekonomi) untuk optimalisasi pembangunan dan ke dua mengembangkan dan mengoptimalkan

lembaga (institusi) untuk kegiatan pembangunan (Kodoatie *et al*, 2002:4). Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan daerah harus merupakan kegiatan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya merupakan proses pemenuhan semua aspek kebutuhan kehidupan pada saat ini (*present*) tanpa menimbulkan berbagai dampak negatif untuk masa yang akan datang (*future*) terutama pada kelestarian lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan diperlukan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil dan merata yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat. Untuk mencapai terwujudnya kelestarian sumber daya air diharapkan adanya koordinasi terpadu antar sektor, antar pemerintah daerah, kesadaran masyarakat serta kemampuan tenaga pengelola pengairan yang berada di lapangan.

Menurut Robert J. Kodoatie *et al* dalam bukunya Pengelolaan Sumber daya Air Dalam Otonomi Daerah secara umum menyatakan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- a. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara nasional dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
- b. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang bersifat spesifik harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan tetap berdasar satuan wilayah daerah pengaliran.

- c. Pendayagunaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dan konsultasi pada masyarakat disetiap tingkat dan mendorong pada tumbuhnya komitmen bersama antar pihak terkait (*stakeholder*).
- d. Pendayagunaan sumber daya air yang berhasil memerlukan komitmen untuk mengembangkan dan pengelolaan secara berkelanjutan dengan pemantuan, evaluasi dan penelitian pada berbagai tingkat untuk menjawab secara efektif kebutuhan yang berkembang di tingkat nasional, proyek, daerah layanan dan wilayah administratif.

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I Tahun 1969, pemerintah telah menyadari pentingnya pengembangan sumber daya air dan pengelolaan Satuan Wilayah sungai (SWS) untuk masyarakat, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang mengindikasikan bahwa sumber daya air bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Dalam pertumbuhan selanjutnya bahwasannya air mengalami ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air terhadap penggunaan air yang semakin meningkat. Sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, maka pemerintah menyempurnakan Undang-undang No. 11 Tahun 1974 dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan SWS masih relevan untuk digunakan karena tidak bertentangan dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Garis-garis peraturan tersebut yakni untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional dan penggunaan sumber daya air didasarkan atas wilayah sungai (Sunaryo *et al*, 2004:30).

Telah diterbitkan pula pedoman yang berkaitan dengan batas-batas hidrologis dan batas-batas administratif SWS melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 48/PRT/1990 tentang pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai. Kedua peraturan tersebut digunakan untuk mengatur penetapan dan pembagian SWS di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya usaha perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dalam satuan wilayah yang terdiri dari 90 SWS. Dari 90 SWS, 72 SWS wewenang pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan. Sedangkan 15 SWS yang lain wewenang pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat yang berada pada Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan 2 SWS lagi wewenangnya dilimpahkan kepada badan hukum tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 ayat 19 menyatakan bahwa Presiden telah menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah berdasarkan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diberikan atas dasar masukan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Penetapan wilayah sungai meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai lintas strategis. Dengan demikian, sebagian wewenang pemerintah

pusat dalam pengelolaan sumber daya air dapat dilimpahkan sebagai tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih baik mencegah dan mengantisipasi berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari kerusakan sumber daya air. Antipasti terhadap dampak seperti banjir dan kekeringan akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan diskusi berkepanjangan saat bencana datang. Walaupun domain kewenangan pemerintah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan, namun upaya kerjasama kemitraan dengan masyarakat juga perlu dijalin. Pemerintah yang dimaksudkan dalam konservasi Mata Air Sumber Brantas adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu sebagai *leading sector* yang secara langsung terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan termasuk konservasi mata air Sumber Brantas.

2. Peran Masyarakat dalam Upaya Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Filosofi partisipasi didasarkan pada pemahaman dan pengakuan bahwa kelompok masyarakat merupakan jantung kegiatan pembangunan dan bukan sekedar sebagai pemanfaat pembangunan, tetapi merupakan unsur dari pembangunan (Achmadi, 2006;17). *World Bank* (1996) dalam Brinkerhoff and Crosby (2002:52) menyatakan bahwa "*Participation can be defined as a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decisions and resources which affect them*". Yang berarti bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana *stakeholder*

saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas perkembangan inisiatif dan keputusan dan sumber-sumber daya yang mempengaruhinya.

Pemerintah dalam berbagai kebijakan harus menyertakan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi. Karena semakin berkembangnya partisipasi, maka demokrasipun akan berkembang pula. Jika pada masa lalu, pemerintah yang dominan dan lebih berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap segala bidang kehidupan termasuk dalam pengelolaan sumber daya air. Namun, seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan perubahan cara pandang khususnya dalam kebijaksanaan sektor publik, peran masyarakat dalam proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya air menjadi penting. *“These objectives participation flow from the revised role of the state where governance brings the public sector and citizens together for policy dialogue and problem solving”*. Jadi tujuan dari partisipasi adalah mengatur peranan negara dimana pemerintah membawa sektor publik dan warga negara bersama-sama dalam berbagai dialog dan penyelesaian masalah. (Brinkerhoff and Crosby, 2002:55). Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara adil, keberlanjutan dan bijaksana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Pasal 70 Bab IX Pemberdayaan dan Pengawasan Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjelaskan sebagai berikut:

Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Ayat 2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

Ayat 3. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Jadi peran serta atau partisipasi masyarakat telah mendapat landasan hukum yang sangat kuat untuk dilaksanakan. Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat di Indonesia adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara dan membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup bukan sekedar menanamkan pengertian masyarakat terhadap permasalahannya saja, tetapi bagaimana membangkitkan partisipasi untuk ikut memelihara kelestarian sumber daya air. Yang diperlukan adalah masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan hidup termasuk kegiatan-kegiatan yang mempengaruhinya, disamping menjaga lingkungannya sendiri.

Yang terpenting adalah bagaimana menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat untuk dapat senantiasa menjaga dan melestarikan sumber daya air. Masyarakat sendiri sebenarnya sadar betapa pentingnya air terutama air pada saat langka, namun sedikit sekali yang peduli terhadap kelestarian sumber daya air. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir untuk diri sendiri daripada ikut memperhatikan dan memikirkan masyarakat lain. Pengaturan kembali DAS perlu mendapat prioritas. Dukungan kebijakan dan peraturan perundangan dari pemerintah sangat diperlukan dalam upaya ini. Sebagai contoh, masyarakat di

kawasan hulu DAS telah menginvestasikan biaya untuk tindakan konservasi air. Berfungsinya bangunan konservasi air di hulu akan berdampak pada terkendalinya aliran permukaan dan mengurangi volume dan intensitas air kiriman ke daerah hilir. Secara tidak langsung masyarakat di daerah hilir yang sudah membantu dari segi finansial untuk diserahkan dan membantu masyarakat di daerah hulu. Dengan demikian seluruh komponen masyarakat dari hulu hingga hilir mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas pengelolaan sumber daya air (Subagyo, 2004).

Ada beberapa sebab partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan sumber daya air memiliki sifat strategis menurut Susskind (1997) dalam (Sunaryo *et al*, 2004:70), yaitu:

- a. Dengan diketahuinya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki secara “lokal” di dalam masyarakat, maka dapat dihindari kemungkinan membuat kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari suatu kegiatan (*error detection*) dan pengalaman. Selain menghilangkan kemungkinan berkembangnya kontroversi, hal-hal tersebut dapat mengantisipasi penolakan secara politis yang secara keseluruhan meningkatkan “biaya/ongkos”.
- b. Dengan melibatkan masyarakat, maka suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat (*public legitimation*). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak hanya mempermasalahkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pengambilan keputusan, namun lebih mempersoalkan keadilan dan konsekuensi dari setiap keputusan.
- c. Tujuan akhir yang dapat dicapai dari usaha menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yakni tumbuhnya aliansi strategis antara pemerintah dan masyarakat (*strategic partnership*). Banyak keputusan yang menyangkut investasi dan pengembangan korporatif bergantung pada tumbuhnya aliansi seperti itu.

Menurut Arnstein (1996) dalam Achmadi, (2006:17) tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi delapan seperti yang ada pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat	Kondisi
8. Kendali masyarakat	Kendali oleh masyarakat
7. Pelimpahan wewenang masyarakat	
6. Kemitraan	
5. Pendamaian	Derajat partisipasi
4. Konsultasi	
3. Informasi	
2. Terapi	Tanpa partisipasi
1. Manipulasi	

Posisi nomor 8-6 merupakan suatu kondisi dimana kendali penuh dan kewenangan pengambilan keputusan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat menyusun rencana dan mengelola kegiatan berdasarkan gagasan dan prioritas yang telah ditetapkan. Pada posisi nomor 5-3 merupakan tahap proses partisipasi, kegiatan yang berlangsung adalah pengumpulan dan penyebaran informasi dari para *stakeholder*, proses ini merupakan bagian dari tahap inisiasi dari proses partisipasi. Tahap selanjutnya adalah kolaborasi atau bekerjasama, dimana *stakeholder* terlibat aktif dan dicapai hasil yang berkelanjutan. Dan yang terakhir pada posisi nomor 2-1 merupakan tingkat tanpa partisipasi, yang berwenang sepenuhnya adalah pemerintah tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan mata air Sumber Brantas berada pada spektrum proses partisipasi, dimana ke dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam mengelola dan melestarikan sumber daya air.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud menggambarkan tentang hubungan kemitraan antara sektor pemerintah dengan masyarakat dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Dengan penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti berharap mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan mengenai sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibilitas

(adanya sumber daya) masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga dana dan waktu (Sugiyono, 2008:20).

Fokus penelitian sangat penting dan diperlukan dalam hal ini digunakan untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal diluar permasalahan. Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan untuk mempermudah peneliti dalam hal melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk itu sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, dapat dilihat dari:
 - a. Peran pemerintah dalam dalam konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu yaitu:
 - 1) Landasan yuridis yang dipakai dalam melakukan sinergi yaitu kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Termasuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat 3 mengenai tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
 - 3) Melaksanakan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai

- b. Peran masyarakat dalam dalam konservasi mata air Sumber Brantas Kota Batu.
 - 1) Keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan/menggunakan mata air Sumber Brantas
 - 2) Keaktifan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan mata air Sumber Brantas
- c. Bentuk atau model kerjasama yang dilakukan antara pemerintah yaitu Kantor Lingkungan Hidup Batu dengan masyarakat adalah:
 - 1) Program, yakni perumusan program penghijauan dilakukan bersama-sama dengan kelompok masyarakat
 - 2) Implementasi program penghijauan dilakukan bersama-sama dengan kelompok masarakat
 - 3) Bidang *financial* oleh KLH Batu
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi yang dijalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas.

C. Lokasi dan Situs penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kota Batu bagian Hukum sebagai pihak dalam pembuatan landasan

hukum (Perwali), Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk mengelola mata air Sumber Brantas di Kota Batu, masyarakat Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji dan Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH) Kota Batu.

Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Berkaitan dengan lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diambil, maka situs penelitiannya diarahkan pada lembaga atau dinas yang relevan dan terkait dengan masalah yang diangkat. Sehingga yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah Kota Batu karena arboretum terletak di Kota Batu, tepatnya di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.

D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu (Puspa, 1977 dalam Patilima, 2005). Setiap peneliti agar mempunyai hasil yang baik sesuai dengan yang dikehendaki tentunya harus ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang digunakan. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Sumber data tersebut menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan jenis datanya adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh secara langsung dari informan atau wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah aparatur Pemkot Batu bagian Hukum, aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar arboretum yaitu masyarakat Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji dan anggota Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH).
2. Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah program yang diambil sebagai upaya konservasi mata air Sumber Brantas, arsip-arsip dan data-data yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Data lain yang menunjang misalnya buku, koran, dokumentasi dan sumber data sekunder lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada aparatur Pemkot Batu bagian Hukum, aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar mata air Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji dan anggota Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH).

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai sinergi masyarakat dan pemerintah sebagai upaya konservasi mata air Sumber Brantas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti akan melakukan observasi mengenai bagaimana sebenarnya hubungan kemitraan yang dijalin pemerintah KLH Batu dengan masyarakat. Peneliti juga melakukan observasi ke arboretum yaitu tempat mata air Sumber Brantas berada, mencari informasi mengenai bagaimana kondisi, manfaat dan fungsi mata air Sumber Brantas bagi menunjang kehidupan masyarakat di 14 kabupaten/kota di Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, foto dan lain-lain yang masih terkait dengan penelitian mengenai sinergi masyarakat dan pemerintah sebagai upaya konservasi mata air Sumber Brantas. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui foto yaitu bagaimana proses interaksi antara KLH Batu, masyarakat desa Sumberbrantas, KMPPH dan para aktor lain yang terlibat selama proses penghijauan berlangsung. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan saat wawancara berlangsung dengan para informan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrumen utama (*instrumen guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati fenomena mengenai arboretum dan mata air Sumber Brantas dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Pengamatan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan daripada penelitian itu sendiri.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada responden agar hasil yang diharapkan dapat maksimal. Wawancara akan dilakukan pada perangkat pemerintahan yang bertugas dalam pelestarian sumber daya air terutama konservasi mata air Sumber Brantas, yang hal ini dilakukan kepada aparatur Pemkot Batu bagian Hukum, aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, masyarakat Desa Sumberbrantas dan anggota KMPPH. Pedoman wawancara akan berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. Hasil dari catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberi hasil tentang penelitian, terutama berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dalam perspektif *good governance*.

G. Keabsahan Data

Agar suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria yang digunakan peneliti untuk keabsahan data yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu:

- a. Memperpanjang masa pengamatan, memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, menguji informasi responden dan untuk membangun kepercayaan diri peneliti sendiri. Peneliti menggunakan masa pengamatan selama empat bulan, hal ini dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas.

- b. Pengamatan yang terus menerus untuk menemukan ciri-ciri, unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. *Peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain), mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Peneliti mendiskusikan hasil penelitian kepada staff KLH Batu yaitu Kasi Pemantauan, Pemulihan, Pengembangan Kapasitas (PPPK), hal ini dilakukan untuk mengetahui data apa yang bisa ditambahkan guna mendukung hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga mendiskusikannya dengan rekan sejawat guna memperoleh masukan demi perbaikan hasil penelitian.

2. Ketergantungan (*Dependability*)

Yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Peneliti konsisten kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya agar tetap fokus menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Kepastian (*Comfirmability*)

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

H. Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang telah diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang ada dipaparkan, dianalisa dan diinterpretasi secara mendalam dan serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Dalam penelitian ini menggunakan metode dari Miles dan Huberman (1992) dalam (Sugiono 2009:91) yang menyatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, antara lain meliputi:

1. *Data Reduction* adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah (*raw method*) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Peneliti memilih dan memilah data mana yang benar-benar berkaitan dengan penelitian.
2. *Data display* adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan tindak lanjut yaitu menganalisis hasil data yang dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. *Conclusion drawing* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan akhir dari kegiatan analisis. Setelah proses analisis selesai dan tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, penulis melakukan penarikan kesimpulan mengenai hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah pembacaan terhadap keseluruhan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Situs Penelitian

a. Kondisi Kota Batu

Kota Batu ($112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$ Lintang Selatan) adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 20 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan di Kota Batu adalah Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur. Batu secara umum terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 800-1900 meter di atas permukaan laut dengan kondisi alam yang sangat baik, potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-

rata Kota Batu 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari. Kota Batu dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), 4 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah penduduk 168.155 jiwa (2001).

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Batu 2001

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Bumiaji	130,189
2.	Batu	46,777
3.	Junrejo	26,234
Total		202,800

Sumber: www.batukota.go.id

Kota Batu telah menjadi penyangga bagi kekayaan sumber daya alam hutan dan air serta keanekaragaman flora dan fauna. Wilayah Batu merupakan bagian penting dari hulu daerah aliran sungai Brantas karena merupakan daerah penyangga kondisi sangat rentan terhadap erosi dan longsor sebagai daerah tangkapan hujan (Sumber: Audio Visual dari KLH Kota Batu). Kota Batu secara ekologis dan hidrologis memiliki fungsi yang sangat vital untuk pelestarian DAS Brantas Hulu. Ratusan sumber air tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Berbagai sumber air itu ada yang berlokasi dikawasan hutan dan banyak pula yang diluar kawasan hutan. Tepatnya ada yang di tanah milik masyarakat dan tanah desa atau negara.

bermuara di selat Madura sejauh 420 km. DAS Brantas menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Jatim di 17 kab/kota. DAS Brantas di Jawa Timur mempunyai panjang 320 km dan memiliki DAS seluas 12.000 km² yang mencakup kurang lebih 25% luas propinsi Jawa Timur. Wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri dan lain-lain.

Nama Arboretum Sumber Brantas diberikan oleh Menteri Kehutanan RI (Bapak Ir. Hazrul Harahap) pada saat berkunjung ke Sumber Brantas pada tahun 1989. Untuk pengembangan berkelanjutan Sumber Brantas ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/1986 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 63/1988 yang mengatur kawasan arboretum sebagai daerah suaka alam dalam wilayah tata pengairan Sungai Brantas. Arboretum Sumber Brantas terletak di sebelah timur kaki gunung Anjasmoro, dengan gambaran secara umum sebagai berikut:

- 1) Ketinggian : ± 1.500 m
 - 2) Curah hujan rata-rata : ± 2.500 mm/thn
 - 3) Temperatur rata-rata : 10 22 C
 - 4) Debit mata air rata-rata : 2,5 liter/detik
 - 5) Luas Arboretum : ± 12 Ha
 - 6) Jenis tanah : andosol dengan tekstur debu
- Sumber: *Profil Jasa Tirta I Malang*

Dalam jangka panjang, air tidak dapat lagi dianggap sebagai sumber daya alam yang bersifat terbarukan (*renewable*). Dikarenakan kecenderungan saat ini

menunjukkan laju pengurasannya (*extractive rate*) jauh lebih tinggi dibandingkan laju regenerasinya (*regeneration rate*). Ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan terjadinya krisis air, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sumber daya air yang bersangkutan (Yusgiantoro, 2003). Fenomena otonomi daerah yang terkadang kurang dipandang sebagai suatu kesatuan kerja antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota berakibat pada kurangnya koordinasi pengelolaan sumber daya air yang pada hakekatnya mempercepat terjadinya krisis air di banyak wilayah.

Banyak sekali permasalahan pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Timur. Permasalahan pengelolaan sumber daya air disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perUndang-Undangan yang tidak memadai. Sumber daya air memerlukan penanganan yang serius mengingat kondisinya sudah semakin parah. Banyak mata air yang mati dan beberapa mata air mengalami penurunan debit. Diperlukan kerjasama yang baik antar *stakeholders* dalam penyelamatan sumber daya air. Dikarenakan untuk menyelamatkan Sungai Brantas harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.



Gambar 4.2. Mata Air Sumber Brantas Pertama Di Desa Sumberbrantas



Gambar 4.3. Mata Air Sumber Brantas ke dua Di Desa Sumberbrantas
Sumber: Dokumentasi peneliti saat melakukan observasi di Arboretum

2. Gambaran Lokus Penelitian

a. Pemkot Batu

Setelah Jawa Timur mempunyai Kota Administratif Jember, muncul Kota Administratif lagi yang sangat diandalkan sebagai sentra wisata Jawa Timur, yaitu

dengan lahirnya Kota Administratif Batu. Kelahiran ini pada tanggal 6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya. Kelahiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatif Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan).

Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu

Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

1) Visi Kota Batu

Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan ditopang SDM, SDA dan SDB yang didayagunakan secara optimal, terkenal dengan pemerintahan kreatif, inovatif, bersih bagi seluruh rakyat.

2) Misi Pengembangan Kota Batu

- a) Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal terkendali sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.
- b) Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
- c) Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda pemerintah daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan publik.
- d) Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:
 - i. Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian
 - ii. Kota Wisata menjadi Sentra Wisata
 - iii. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan, secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
- e) Akselerasi pembangunan sektor fisik
- f) Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem.

- g) Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.
- h) Menciptakan kehidupan politik demokratis.

Sumber: [www. Batukota.go.id](http://www.Batukota.go.id)

b. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup. Landasan hukum institusi ini berdasarkan Perda Kota Batu No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah kota Batu. KLH Kota Batu merupakan lembaga teknis daerah.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih, bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun sistem pertanggung jawaban yang tepat. Upaya ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu tahun 2007-2012. Dimana Renstra merupakan acuan bagi kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian visi misi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang optimal, maka dirumuskan visi dan misi KLH Kota Batu sebagai berikut:

1. Visi

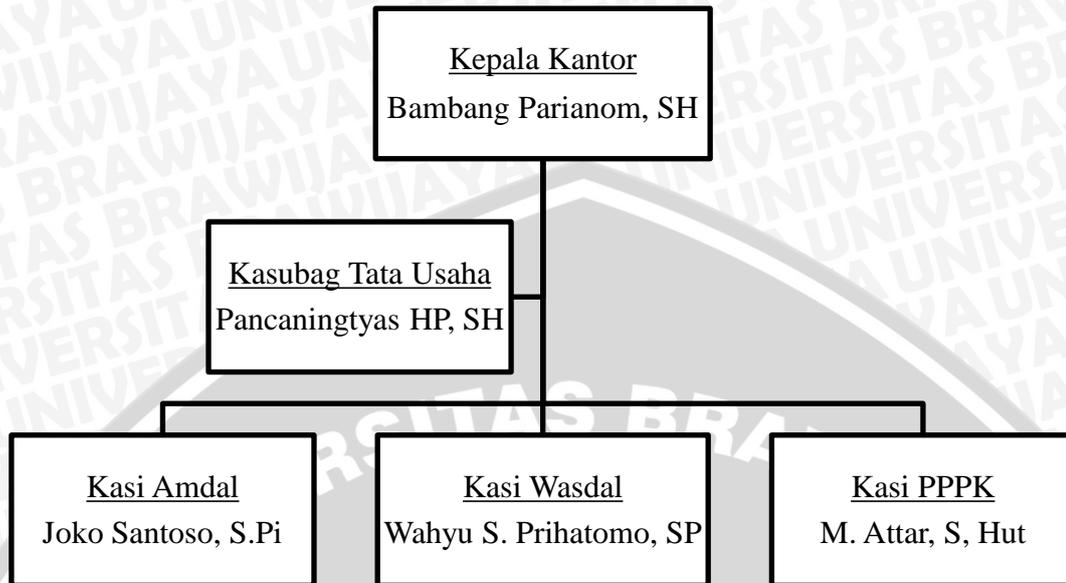
Terwujudnya ketahanan ekologi kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian merupakan kawasan strategis penyangga ekosistem hulu DAS Brantas.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut KLH Kota Batu mempunyai misi: “Mencapai ketahanan ekologis sebagai penyangga ekosistem hulu DAS Brantas” yang dijabarkan strategi pembangunan sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan mengembangkan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan
- b) Melaksanakan perumusan dan pengembangan kebijakan, koordinasi serta pelaksanaan kebijakan
- c) Memberdayakan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terbangunnya sinergitas konservasi, produksi dan rekreasi.
- d) Meningkatkan pelayanan administrasi dan sarana prasarana aparatur.

Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup kota Batu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2008 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4. Bagan Struktur Organisasi KLH Kota Batu
Sumber: KLH Kota Batu Kasubag Tata Usaha

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup kota Batu yakni kepala kantor sebagai pimpinan yang memberikan instruksi secara langsung kepada para kepala jabatan, sekretaris dan kepala bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2008 pasal 2 tugas dari Kepala Kantor adalah memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang lingkungan hidup. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kepala Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pembinaan lingkungan hidup
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- c) Pelaksanaan koordinasi pembangunan di bidang pembinaan lingkungan hidup di antara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemda dan Instansi terkait
- d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selain itu, Kepala Kantor juga berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi lain terkait.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan.
2. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pengembangan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan dibidang Amdal.
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan badan air, tanah, udara dan kerusakan lingkungan.

4. Seksi Pemantauan, Pemulihan, Pengembangan Kapasitas (PPPK) mempunyai tugas melaksanakan upaya pemulihan, pemantauan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.

c. Masyarakat Desa Sumberbrantas

Desa Sumberbrantas yang sebelumnya secara administratif masih ikut wilayah Desa Tulungrejo dan dulunya adalah sebuah dusun yang jarak dusun ke desa ± 10 km. Secara tidak langsung pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, dengan perkembangan penduduk sangat cepat, baik sosial maupun perekonomiannya maka masyarakat merasa perlu adanya pelayanan yang cepat dan tepat. Dengan maksud untuk mendapat pelayanan secara optimal/maksimal serta memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan surat menyurat agar lebih dekat dan lebih cepat, maka masyarakat Dusun Sumber Brantas berkeinginan memisahkan diri dari pemerintahan Desa Tulungrejo dengan cara mengajukan permohonan pemekaran wilayah desa ke pemerintahan Kota Batu melalui Panitia Pemekaran Wilayah Desa yang dibentuk melalui musyawarah warga, sehingga pada tanggal 21 Desember 2005 Dusun Sumber Brantas diresmikan menjadi desa Persiapan oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul Msi, MHum dan setelah \pm dua tahun menjadi Desa Persiapan Sumber Brantas, maka pada tanggal 22 Agustus 2007 juga Oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul Msi, MHum diresmikan menjadi Desa Definitif.

Gambaran secara umum Desa Sumberbrantas yaitu:

1. Luas Desa : 541,1364 Ha
2. Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Hutan / Kab. Mojokerto
- b) Sebelah Timur : Hutan Gunung Arjuno/Gunung Welirang
- c) Sebelah Selatan : Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo
- d) Sebelah Barat : Hutan / Gunung Anjasmoro

3. Kondisi Geografis

- a) Ketinggian Dari Permukaan Laut : 1.400 s/d 1.700 dpa
- b) Curah Hujan : Tinggi
- c) Topografi : Dataran Tinggi
- d) Suhu Rata-rata : 12°c s/d 22 °c

4. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

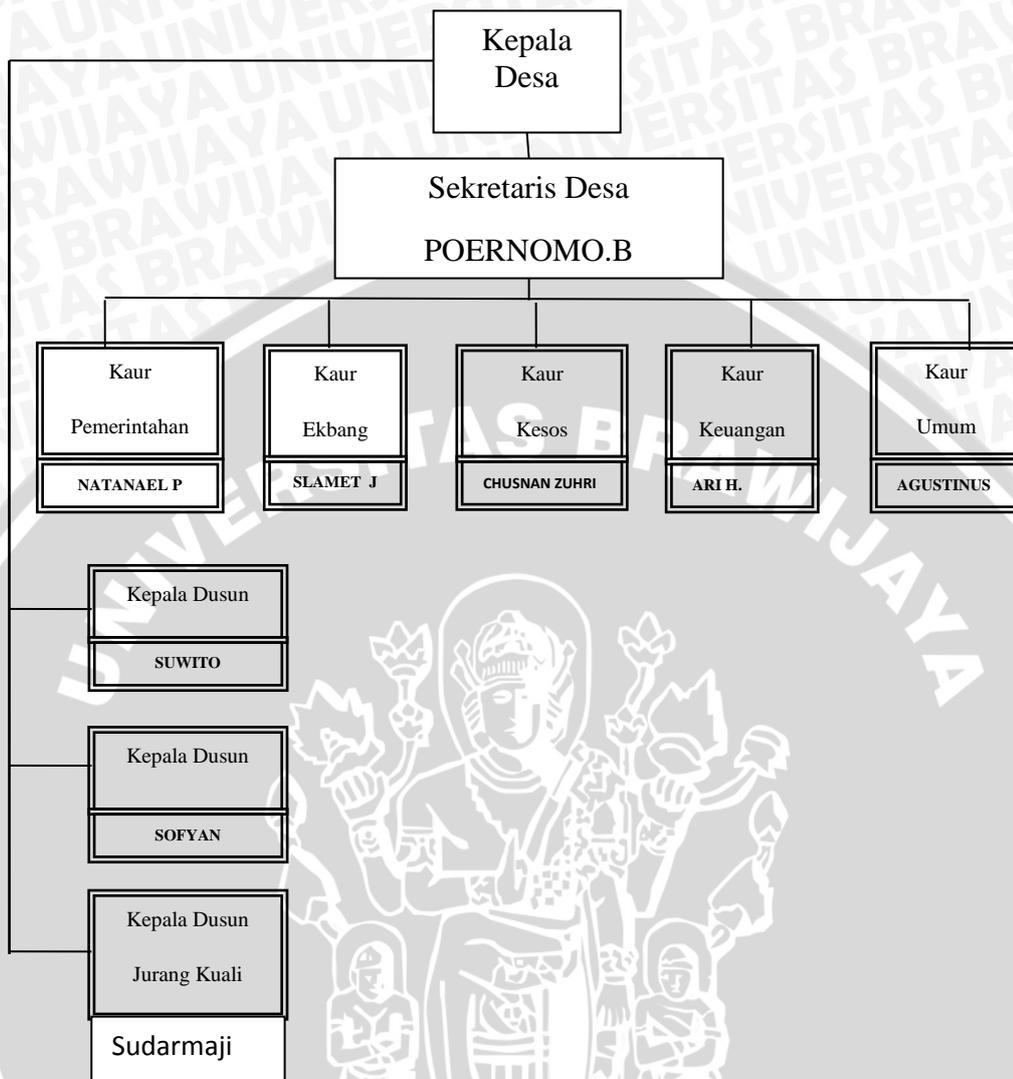
- a) Jarak Dari Pemerintah Kecamatan : 13 Km
- b) Jarak Dari Pemerintah Kota : 18 Km
- c) Jarak Dari Pemerintah Propinsi : 144 Km
- d) Jarak Dari Ibukota Negara RI : 923 Km

Dusun Sumberbrantas terbentuk atau ada sejak masa penjajahan Belanda yang diambil dari kata Pusatnya/sumber mata air Kali Brantas yang dirangkai menjadi Sumber Brantas. Desa Sumberbrantas merupakan daerah Pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang sangat subur, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Mata pencaharian penduduk Desa Sumberbrantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur mayur dan hortikultura. Di desa tersebut sesuai dengan namanya terdapat mata air Sungai Brantas yang mengalir ke beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 4.2. Profil Penduduk Desa Sumberbrantas tahun 2011

No.	Uraian	Jumlah
Dusun		
1.	Lemah Putih	2309 Orang
2.	Krajan	909 Orang
3.	Jurang Kualo	1324 Orang
Total		4542 Orang
Jenis Kelamin		
1.	Perempuan	2190 Orang
2.	Laki-laki	2352 Orang
Total		4542 Orang
Struktur Mata Pencaharian		
1.	Buruh	737 Orang
2.	Petani	1481 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	6 Orang
4.	Pegawai Swasta	266 Orang
5.	Pedagang	46 Orang
6.	Pelajar	1601 Orang
7.	Tidak Bekerja	451 Orang
Total		4542 Orang
Tingkat Pendidikan		
1.	Taman Kanak-Kanak	130 Orang
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	2960 Orang
3.	SLTP / Sederajat	636 Orang
4.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	345 Orang
5.	Akademi	20 Orang
6.	Sarjana	26 Orang
7.	Tidak Sekolah	425 Orang
Total		4542 Orang
Kelembagaan		
1.	Pemerintah Desa	
2.	Lembaga Kemasyarakatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ▪ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ▪ Linmas ▪ Lembaga Kemasyarakatan: Karang Taruna, PKK dan jamaah Tahlil, Gapoktan ▪ Posyandu 	

Sumber: Kantor Desa Sumberbrantas



Gambar 4.5. Bagan Struktur Organisasi Desa Sumberbrantas tahun 2011
 Sumber: Kantor Desa Sumberbrantas

d. KMPPH (Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan)

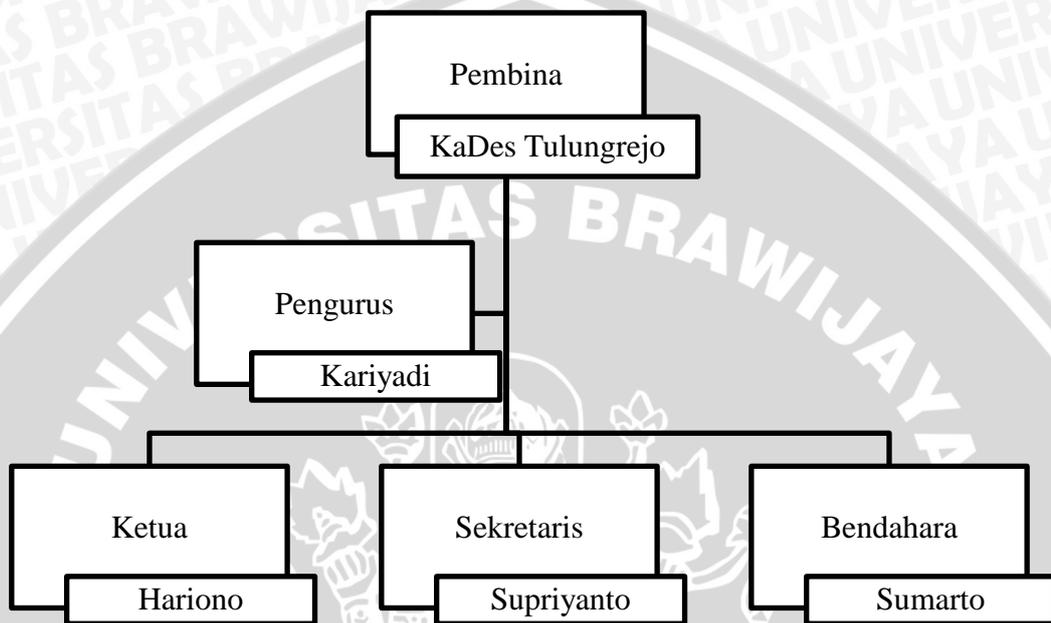
KMPPH adalah organisasi masyarakat yang bersifat independen dan non politis yang mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Kelompok masyarakat ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun potensi dan menggalang kesatuan dalam masyarakat yang mempunyai persamaan kehendak dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kelestarian serta pendayagunaan hutan di wilayah Kota Batu. KMPPH yang berkedudukan di Kota



Batu dan beraktifitas diseluruh wilayah Indonesia. Kelompok masyarakat ini terdorong keinginan untuk mencapai tujuan ikut melestarikan hutan menjadi hijau kembali dan masyarakat bisa sejahtera, untuk mewujudkannya perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, KMPPH merasa terpanggil untuk ikut serta dalam menata lingkungan dan melestarikan hutan. Sebagian besar anggota KMPPH bertempat tinggal di wilayah Tulungrejo, Coban Talun yang tidak jauh dengan keberadaan mata air Sumber Brantas. KMPPH ditetapkan berdiri sejak tanggal 01 Agustus 2011 berdasarkan SK Menteri Kehakiman & HAM RI No. C-66. HT.03.01 Tahun 2001 dan PPAT SK Kepala Badan Peratanahan Nasional No. 31-XI-2000. KMPPH bertujuan menghimpun masyarakat yang telah menjadi anggotanya untuk:

1. Berperan serta membantu pemerintah dalam upaya menjadikan hutan hijau kembali
2. Ikut serta membatu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber mata air
3. Ikut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui upaya peningkatan permodalan dan penyediaan bibit tanaman yang diperlukan
5. Berperan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang berbudi luhur serta bertanggung jawab atas lingkungan hidup

6. Membantu menyalurkan aspirasi profesi anggota sebagai peran serta positif untuk mendukung program-program pemerintah Kota Batu guna mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Wisata



Gambar 4.6. Bagan Struktur organisasi KMPPH
Sumber: Ketua KMPPH

3. Governance

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memanfaatkan, mengelola dan menggunakan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya yang digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya adalah sumber daya air. Pelayanan sumber daya air merupakan kebutuhan vital setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Air yang digunakan berasal dari mata air-mata air yang mengalir di sungai Brantas. Daerah aliran sungai (DAS) Brantas merupakan salah satu dari enam DAS super prioritas yang ditentukan oleh pemerintah untuk memperoleh

perhatian dan ditangani dengan sungguh-sungguh mengingat tingkat kekritisannya yang sudah parah dan fungsinya sangat besar bagi masyarakat banyak. Perkembangan sosial, demografi dan ekonomi yang berjalan seiring dengan tuntutan pembangunan belum bisa sinergis dengan penguatan konservasi. Kecenderungan demikian menyisakan problem ekologi yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang mengancam masa depan.

Pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator, regulator dan pengawas yang dipresentasikan oleh instansi-instansi sektoral pemerintah daerah. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu merupakan perangkat pemerintah daerah (*leading sector*) yang bertugas dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup termasuk menjaga sumber daya air untuk wilayah Brantas. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu menyelenggarakan program-program yang telah ditentukan dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Namun, dari program-program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan belum dapat mencapai sasaran atau output yang diharapkan. Hal ini dikarenakan penyelamatan DAS Brantas tidaklah mudah, penyelamatan DAS Brantas tidak dapat dilakukan hanya di hulu saja tetapi diseluruh wilayah mulai dari hulu sampai hilir. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KLH kota Batu (28 September 2011):

“Selama ini, Kantor Lingkungan Hidup kota Batu telah melakukan upaya/aktivitas dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Namun, tidak ada sasaran dan fokus yang dicapai secara maksimal.”

Selain itu, KLH Kota Batu juga merasa bahwasannya dari pihak pemerintah di atasnya sendiri yaitu Walikota dan perangkat daerah lainnya tidak bersungguh-sungguh dalam menangani penyelamatan sumber daya air. Sementara kondisi lingkungan sekarang ini sudah mencapai tingkatan yang cukup parah. Pembangunan terus dilakukan namun tanpa disertai dengan penyelamatan kelestarian alamnya. Belum adanya peraturan dan kebijakan yang jelas mengenai bagaimana penyelamatan sumber daya air itu dilakukan telah menyebabkan permasalahan sumber daya air semakin kompleks. Dan belum ada dari pihak pemerintah yang memikirkan keselamatan akan lingkungan dengan cara berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama kerjasama dengan masyarakat untuk menyelamatkan sumber daya air. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KLH kota Batu dalam wawancara (28 September 2011 pukul 19.30) seperti berikut:

“Birokrat itu miskin akan inisiasi. Walikota Batu sendiri justru membiarkan segala pembangunan dilakukan tanpa adanya penyelamatan terhadap kelestarian lingkungan. Contohnya pembangunan apartemen di Suhat, amdalnya sebenarnya dianggap tidak sah karena menyalahi aturan. Seharusnya pembangunan suatu bangunan 10meter dari bibir sungai. Namun pembangunan apartemen di Suhat terus dilanjutkan. Pembangunan retail-retail modern juga terus dilakukan di Kota Batu”

Permasalahan ekologi di Batu yang dihadapi ada 3 aspek:

1. Deforestasi di kalangan hutan, hutan-hutan sudah mulai gundul dan kelebataannya berkurang
2. Degradasi lahan, pengolahan lahan yang teras miring itu rawan longsor dilereng-lereng perbukitan

3. Pembangunan fisik yang mengorbankan ruang terbuka hijau tanpa adanya upaya regenerasi kembali untuk menanam pohon

Program konservasi yang pernah oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu dilakukan untuk melestarikan mata air Sumber Brantas yaitu:

1. Vegetatif

Upaya konservasi dengan cara penghijauan disekitar mata air Sumber Brantas. Upaya konservasi vegetatif lebih banyak dilakukan karena lebih praktis dan efisien, seperti penggunaan legium (tanaman penguat) untuk mencegah terjadinya erosi. Upaya vegetatif ini dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman keras seperti pohon langon dan apel ana yang lebih mudah dan murah. Dan juga mengganti tanaman semusim yaitu sayur-sayuran dengan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

2. Civil teknis

Upaya konservasi dengan cara membuat sumur resapan. Pembukaan sumur resapan ini dibuat di 3 desa (sebagai percontohan dan masing-masing desa 5 sumur resapan). Selain itu upaya civil teknis lainnya adalah pembuatan biopori di 3 desa (sebagai percontohan dan masing-masing desa 10 biopori). Biopori adalah lubang yang dengan diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30 sampai 100 cm yang ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah, tumbuhan di sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh-

tumbuhan. Manfaat Biopori adalah mencegah terjadinya banjir, persediaan air tanah terjamin dan mencegah terjadinya erosi serta tanah longsor.

3. Terasering

Terasering merupakan kondisi lereng yang dibuat bertangga-tangga yang dapat digunakan pada timbunan atau galian yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan longsor. KLH Kota Batu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar arboretum agar menggunakan teknik lahan terasering. Jika tidak, lahan milik masyarakat akan menjadi lahan potensial kritis. Lahan potensial kritis adalah lahan yang masih produktif bila diusahakan untuk pertanian tanaman pangan. Namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis.



Gambar 4.7. Terasering Di Desa Sumberbrantas
Sumber: Dokumentasi KLH Kota Batu

Untuk program yang akan dilakukan oleh KLH Kota Batu sesuai dengan penjelasan Kasi Seksi Pemantauan, Pemulihan, Pengembangan Kapasitas (PPPK) dalam wawancara (6 Desember 2011 pukul 09.00) yaitu melakukan pengamatan atau *survey* dan pengujian kualitas air yang keluar dari mata air Sumber Brantas,

karena Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu sangat berkepentingan dalam menjaga kualitas air di sumber mata air. Sedangkan program untuk meningkatkan kuantitas atau debit mata air tersebut dilakukannya koordinasi dengan pengelola UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo (cangar) dan Perum Perhutani KPH Malang karena wilayah *catchmen area* (tangkapan air hujan yang nantinya akan muncul menjadi mata air Sumber Brantas) merupakan wilayah kerja UPT Tahura R. Suryo dan Perum perhutani KPH Malang. Selain itu akan lebih intensif lagi dilakukannya upaya penyuluhan dan kampanye/penyadaran masyarakat agar tidak melakukan penebangan atau perusakan hutan disekitar mata air Sumber Brantas dan merubah perilaku masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani agar menjadi petani yang ramah lingkungan (pertanian yang sesuai dengan kaidah–kaidah konservasi tanah dan pelestarian lingkungan).

b. Peran Masyarakat

Pemerintah dalam pembuatan berbagai kebijakan harus menyertakan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi. Karena semakin berkembangnya partisipasi masyarakat, maka demokrasipun akan berkembang pula. Masyarakat termasuk salah satu *stakeholder* yang harus dilibatkan oleh pemerintah dalam berbagai bidang termasuk dalam urusan lingkungan hidup. Masyarakat merupakan faktor penting dalam kegiatan konservasi mata air Sumber Brantas, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan fokus kegiatan. Semakin besar rasa peduli masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, maka semakin terjaga pula mata air Sumber Brantas.

Terdapat dua kelompok masyarakat yang berperan serta dalam menjaga dan melestarikan mata air Sumber Brantas. Yang pertama adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai representasi atau perwakilan dari masyarakat Desa Sumberbrantas dan Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Seluruh masyarakat Desa Sumberbrantas memanfaatkan aliran dari mata air Sumber Brantas untuk irigasi di ladang melalui pompa. Segala kegiatan/aktivitas yang menyalahi kaidah konservasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah hulu akan berdampak negatif di daerah hilir. Apabila konservasi mata air Sumber Brantas tidak dilakukan secara sungguh-sungguh maka akan berdampak pada seluruh masyarakat di 14 kabupaten/kota di Jatim. Selain itu, bagi masyarakat sebagai pengguna langsung dari aliran mata air Sumber Brantas akan menerima dampaknya berupa berkurangnya sumber air, longsor dan banjir. Potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas terhadap rawan bencana berkaitan erat dengan situasi alam disekitarnya. Penebangan hutan, penggunaan lahan yang tidak terasering dan pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan telah menyebabkan munculnya potensi rawan bencana. Oleh karena itu, konservasi terhadap mata air Sumber Brantas sangat penting untuk dilakukan.

Pada tahun 2003, terjadi bencana banjir di daerah Sumber Brantas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jurang Kualo dalam wawancara (03 November 2011 pukul 09.00) bahwasannya penyebab terjadinya banjir adalah banyaknya perambahan hutan dan sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan disekitarnya. Sebagian lahan milik masyarakat masih teras

miring bukan terasering, hal ini akan berakibat pada mudahnya terjadi erosi. Dan untuk menjadikan lahan masyarakat yang masih teras miring menjadi terasering membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat melakukannya dengan cara manual yaitu mencangkul tanah dari atas ke bawah. Selain itu, untuk mengubah lahan yang teras miring menjadi terasering membutuhkan dana yang cukup besar, hal ini dikarenakan pemilik lahan tidak mungkin melakukannya sendiri dan akhirnya membayar orang untuk mengubah lahannya menjadi terasering. Masyarakat Desa Sumberbrantas melakukan upaya konservasi mata air Sumber Brantas melalui beberapa cara yaitu:

1. Melakukan penghijauan disekitar arboretum dan di daerah perbatasan
2. Sistem penanaman secara terasering untuk menghindari sedimen
3. Menanam partiver (rumput akar wangi)
4. Menanam apel, kesemek dan kopi di lahan-lahan masyarakat

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari pentingnya mata air Sumber Brantas bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat di 14 kabupaten/kota. Oleh karena itu muncul kelompok masyarakat peduli lingkungan yang diberi nama Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Awal munculnya kelompok masyarakat karena merasa prihatin terhadap keadaan lingkungan yang semakin lama mengalami degradasi terutama jumlah hutan yang semakin menurun, seperti dalam penjelasan Ketua KMPPH dalam wawancara 29 Januari 2012 pukul 09.00:

“Saya sendiri sebagai masyarakat biasa merasa sangat prihatin dengan keadaan lingkungan saat ini, terutama kondisi hutan di Batu yang semakin berkurang. Oleh karena itu, saya dan teman-teman KMPPH bertekad

untuk menjadikan hutan kembali hijau dan membantu pemerintah dalam melestarikan lingkungan Kota Batu”

Anggota KMPPH menginginkan agar hutan di Kota Batu dapat kembali hijau. Secara tidak langsung, dengan hutan yang lebat kembali dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas mata air. Hutan mempunyai peranan yang penting karena hutan merupakan penyangga utama bagi keberadaan mata air.

Rencana program kerja KMPPH sebagai berikut:

a) Program jangka pendek

- 1) Membenahi dan melengkapi segala kebutuhan organisasi
- 2) Rekrutmen calon anggota baru
- 3) Pengiriman surat pemberitahuan kepada Instansi terkait mengenai keberadaan organisasi
- 4) Mengusahakan keberadaan sekretariat ditempat yang strategis

b) Program jangka menengah

- 1) Memperhatikan kepentingan hutan di sekitar kita
- 2) Mengikuti gerakan penghijauan
- 3) Mencari lahan untuk penghijauan dan pembibitan

c) Program jangka panjang

- 1) Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, baik lokal maupun regional
- 2) Membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup
- 3) Membuat wadah koprasi untuk kesejahteraan anggota
- 4) Ikut membantu mengantisipasi keberadaan titik mata air di daerah Bumiaji

Batu

- 5) Ikut membantu pemerintah untuk membuka lowongan kerja, khususnya anggota dan masyarakat
- 6) Ikut membantu menyalurkan aspirasi anggota sebagai peran serta positif untuk mendukung program pemerintah kota Batu, guna mewujudkan kota Batu sebagai kota Pariwisata

c. Sumber Daya Air Kota Batu

Dilihat dari kondisi hidrologi, Kota Batu merupakan daerah resapan sehingga tidak akan kekurangan air bersih dan air minum karena di Kota Batu banyak terdapat sumber mata air. Ketersediaan air sungai diperoleh dari lima buah sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas, yang berhulu di Desa Sumberbrantas. Selain untuk kebutuhan internal kawasan, hidrologi Kota Batu juga melayani kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Sampai saat ini, wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 138 sumber mata air produktif yang sebagian dimanfaatkan oleh PDAM Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang, swasta dan masyarakat untuk irigasi .

Meskipun secara hidrologi Kota Batu memiliki banyak kelebihan dan merupakan sebuah daerah resapan, namun pada kenyataannya di Kota Batu telah terjadi degradasi mata air di beberapa wilayah. Beberapa permasalahan sumber daya air di Kota Batu dalam RTRW Kota Batu tahun 2003-2013 adalah:

1. Banyak kawasan konservasi yaitu daerah yang terjal dengan kemiringan 25 % keatas digunakan untuk kawasan terbangun. Salah satu contoh banyak menjamurnya villa-villa yang berada di kawasan konservasi. Keadaan ini berdampak pada terjadinya erosi/tanah longsor dan banjir lumpur.

2. Kondisi debit air di Kota Batu cenderung menurun. Keadaan ini disebabkan karena semakin banyaknya perambahan hutan yang terjadi di Kota Batu sehingga mempengaruhi kondisi hidrologi.
3. Masih terdapatnya daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih dan air minum, walaupun Kota Batu kaya akan sumber mata air. Disamping itu, ada sumber mata air yang terbuang secara sia-sia akibat kurangnya sistem pemanfaatan dan pengelolaan air yang kurang maksimal (misalnya di daerah sekitar Payung).

d. Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, memiliki kerentanan terhadap manajemen pengelolaan sumber daya air yang ada. Air yang memiliki fungsi pokok penunjang kehidupan manusia, saat ini telah mengalami degradasi pada kuantitas dan kualitasnya. Pengalihan lahan, berkurangnya hutan sebagai penyangga air dan banyaknya pembangunan yang tidak ramah lingkungan telah menimbulkan berbagai dampak seperti krisis ketersediaan air bersih, banjir dan tanah longsor.

Upaya antisipasi dampak negatif sumber daya air tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 70 dijelaskan, bahwa salah satu wujud implementasi manajemen sumber daya air adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, antara pemerintah dan

masyarakat harus memiliki pemahaman yang komprehensif demi terwujudnya konservasi mata air Sumber Brantas secara maksimal.

Berdasarkan kondisi obyektif di atas, maka Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu bekerjasama dengan masyarakat dan didukung oleh berbagai pihak terkait yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi mata air Sumber Brantas. Tujuannya adalah untuk melestarikan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun, keseimbangan ekosistem terganggu dan kelestarian DAS Brantas dengan keragaman hayatinya terancam. Kondisi sumber-sumber air di Kota Batu kini semakin terancam, mengalami penurunan debit air dan sebagian mati. Batu adalah kawasan penyangga hulu DAS Brantas, untuk itu penghijauan disekitar kawasan sumber air sangat penting. Kelestarian sumber air sangat tergantung kondisi vegetasi daerah tangkapan dan resapan airnya.

Kantor Lingkungan Hidup Batu mempunyai aktivitas dan kegiatan namun tidak mencapai sasaran, hal itu dinilai kurang maksimal karena kurangnya peran serta masyarakat yang mendukung setiap program yang akan dilaksanakan oleh KLH Kota Batu terkait dengan konservasi mata air Sumber Brantas. Salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai inisiator, oleh karena itu Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu mempunyai inisiatif dalam membangun sinergi dengan masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Proses kerjasama dibangun dalam penyelamatan sumber-sumber air. Karena bukan lagi saatnya bekerja sendiri-sendiri melainkan bagaimana membangun sinergitas antara *state* dan *civil society*.

Sinergi ini diwujudkan dalam program yang diberi nama “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat”.

Bentuk sinergi yang dijalin antara KLH Kota Batu dengan masyarakat Desa Sumberbrantas dan para NGO yaitu KMPPH, Yayasan Pusaka dan FK MPL sebagai berikut:

1. Program-program penghijauan dirumuskan oleh KLH Kota Batu bersama-sama dengan wakil Gapoktan sebagai representasi dari masyarakat Desa Sumberbrantas dan anggota KMPPH
2. Bantuan *financial* dan pemberian bibit tanaman dari KLH Kota Batu kepada masyarakat Desa Sumberbrantas
3. Proses penanaman dilakukan bersama-sama oleh segenap pihak terkait yang peduli lingkungan
4. Untuk perawatan tanaman mulai dari menyirami, memberikan pupuk dan memanen hasil tanaman dilakukan oleh masyarakat

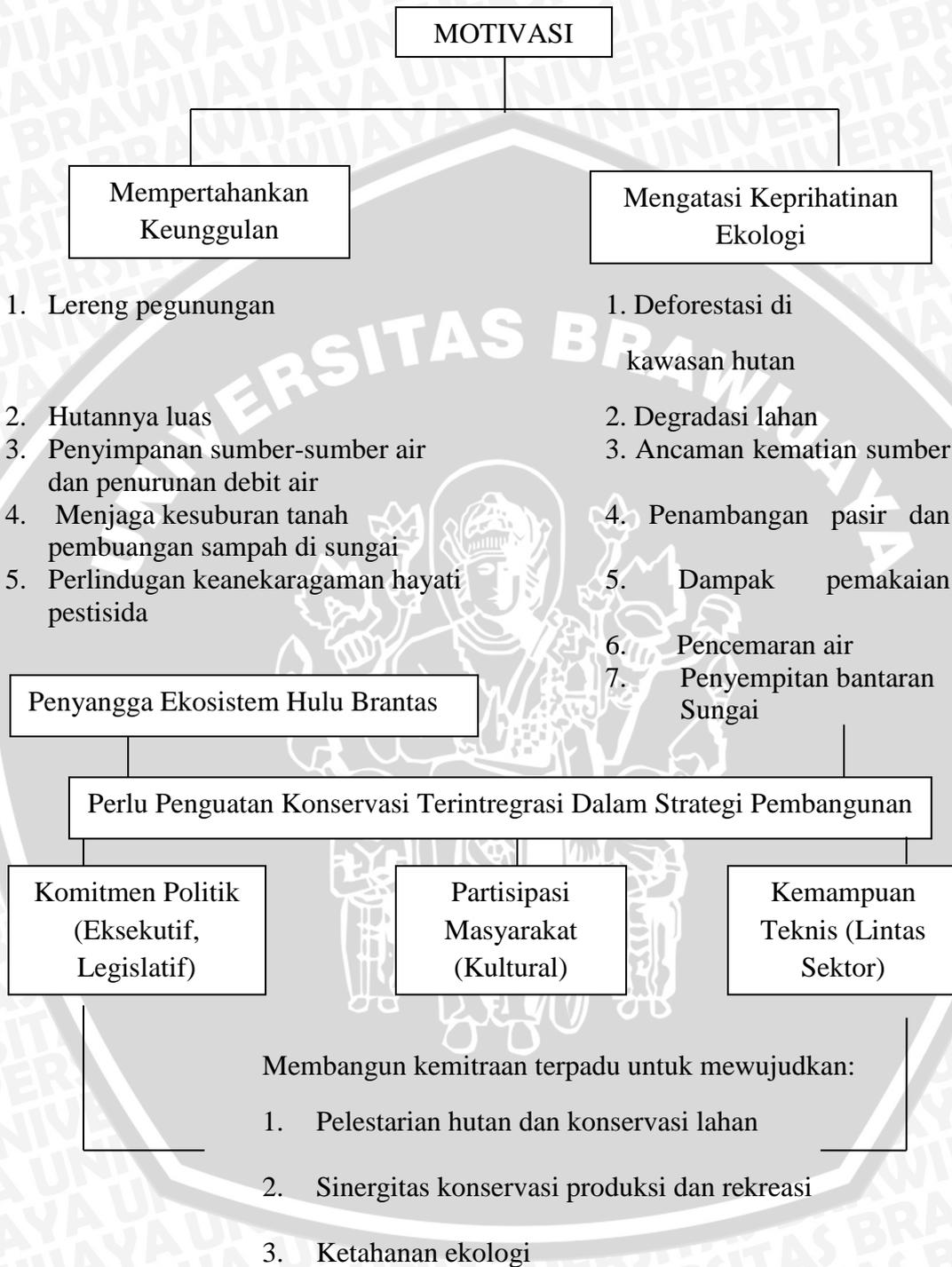
Untuk menjaga ketahanan ekologi di Kota Batu tidak bisa dari pendekatan institusional, artinya hanya dari pemerintah saja seperti KLH Kota Batu, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dll yang berhubungan dengan proses konservasi sumber daya air. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia terbatas dan kesempatan terbatas sekalipun ada tugas institusi yang harus dijalankan dan kemampuan dibidang finansial. Jika pemerintah melakukannya sendiri hasilnya tidak akan maksimal. Aktor-aktor setiap harinya yang berhubungan langsung dengan penggunaan sumber air ini adalah masyarakat.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah hulu akan berakibat pada daerah hilir.

Masyarakat ada yang pro lingkungan dan ada juga masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Seringkali terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dengan ekologi. Sehingga KLH memandang segala kegiatan dan program harus gerakan yang berbasis masyarakat. Jadi ada upaya mensinergikan antara ekonomi dan ekologi. Kota Batu harus ada sinergi antara konservasi, produksi dan rekreasi.

Program penghijauan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain untuk menyelamatkan lingkungan dan menjaga kondisi mata air, pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan masyarakat mendapatkan hasilnya melalui bibit tanaman yang diberikan oleh pemerintah. Bibit yang digunakan untuk penghijauan seperti apel ana, alpukat, kesemek, juwet, mundu dll. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat bermanfaat untuk menahan erosi, selain itu juga dapat memberikan keuntungan pada petani Desa Sumberbrantas pada saat panen. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Gapoktan Desa Sumberbrantas dalam hasil wawancara (20 Desember 2012 pukul 14.00) sebagai berikut:

“Kami para petani juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dijalin dengan pemerintah KLH Batu. Karena bibit tanaman yang diberikan merupakan bibit tanaman yang hasilnya nanti bisa kami panen seperti apel dan kesemek. Jadi lingkungan terjaga karena tanaman ini merupakan tanaman penguat yang dapat menahan erosi dan kami para petani juga mendapat keuntungan secara ekonomi”



Gambar 4.8. Strategi Batu Giat Peduli Lingkungan Penguatan Konservasi Hulu Brantas

Sumber: KLH Kota Batu

Program ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya air di wilayah arboretum. Implementasi program ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Kampanye lingkungan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan penyelamatan DAS Brantas, dengan cara memberikan sosialisasi atau himbauan kepada warga.

2. Pembuatan biopori untuk penanganan sampah rumah tangga agar tidak dibuang ke DAS Brantas dan pembuatan sumur resapan.

3. Penanaman Hutan Pendidikan

Tanggal 23 Desember 2011 dilaksanakan program penghijauan di wilayah Desa Tlekung yang diikuti oleh KLH Kota Batu, Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL), Kades desa Tlekung dan anggota Koramil Batu. Gerakan ini dilakukan selama dua hari. Hari pertama melakukan penggalian lubang (ceplong) yang dikerjakan oleh 10 orang sebanyak 100 lubang. Dan hari ke dua tanggal 24 Desember 2011 melakukan penanaman bersama-sama sebanyak 500 pohon yang meliputi 300 pohon jambu dan 200 pohon non jambu (kayu hitam, salam, juwet, kenongo dan mundu).

4. Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumber Brantas

Program ini dilakukan mulai tanggal 26 Desember 2011 sampai 4 Januari 2012 yang diikuti oleh KLH Kota Batu, Yayasan Pusaka (Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam), KMPPH, FKMPL, Gapoktan Desa Sumberbrantas dan Koramil Kota Batu. Penghijauan dimulai

pada tanggal 26 Desember 2011 di wilayah petak 46 (kawasan hutan yang dipeta-petakan di sekitar mata air Sumber Brantas) sebanyak 800 pohon yang terdiri dari 300 pohon ceri, 200 pohon jambu merah, dan 300 pohon campuran. Pada tanggal 31 Desember 2011 melanjutkan penanaman di petak 46. Dan hari terakhir tanggal 4 Januari 2012 menyelesaikan kegiatan penghijauan di wilayah petak 46 diikuti oleh seluruh pihak terkait termasuk Walikota Batu yang menanam secara simbolis.

Program “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat” dirumuskan bersama-sama dengan pihak terkait yang peduli lingkungan seperti Yayasan Pusaka, FK MPL, KMPPH, dan Gapoktan Desa Sumberbrantas. Dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, KLH Kota Batu mengundang para perwakilan masyarakat untuk membahas dan menampung aspirasi masyarakat mengenai keadaan lingkungan.

Tabel 4.3. Frekuensi pertemuan KLH Kota Batu dengan pihak terkait konservasi sumber mata air di Kota Batu

Waktu	Tempat	Peserta	Topik
20 September 2011	Hotel Royal Orchid Garden Jl. Indragiri No. 4 Kota Batu	1. KLH Kota Batu 2. FK MPL 3. KMPPH	Sosialisasi pertanian ramah lingkungan dengan vegetasi
21 September 2011	Hotel Royal Orchid Garden Jl. Indragiri No. 4 Kota Batu	1. KLH Kota Batu 2. FK MPL 3. KMPPH	Perumusan program penghijauan di wilayah Tlekung

Dilanjutkan.....

Lanjutan....

5 Oktober 2011	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. Yayasan Pusaka 3. FK MPL 4. KMPPH 5. Gapoktan Desa Sumberbrantas 	Perumusan Program Penghijauan “Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumber Brantas”
14 November 2011	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. Yayasan Pusaka 3. FK MPL 4. KMPPH 5. Gapoktan desa Sumber 	Sosialisasi program penghijauan “Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumber Brantas”

Sumber: Sekretaris KMPPH

Mengingat posisi Kota Batu dalam konteks regional merupakan kawasan tangkapan air dan hulu Sungai Brantas yang melayani wilayah lainnya di Jawa Timur, terganggunya komunitas hutan di kota ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup besar bagi wilayah lainnya. Maka, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) dengan kabupaten/kota yang ada disekitar Kota Batu dalam memelihara hutan dan lingkungan yang ada di Kota Batu, karena dampak yang terjadi tidak saja berada di hulu tetapi hilirnya juga (RTRW Kota Batu tahun 2003-2013).

4. Faktor Pendukung Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Upaya konservasi sumber daya air dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan maupun dukungan. Hambatan maupun dukungan inilah yang nantinya dapat menentukan keberhasilan dari upaya konservasi tersebut. Kedua komponen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya konservasi yang lebih baik. Berikut adalah faktor pendukung sinergi yang terjalin antara pemerintah yaitu KLH Kota Batu dan masyarakat Desa Sumberbrantas:

1. Adanya sumber daya manusia sebagai motivator yakni masyarakat cinta lingkungan yang turut berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya air.
2. Masyarakat bersikap terbuka terhadap segala program kerjasama dari pemerintah KLH Kota Batu.
3. Keinginan dan tekad dari para anggota untuk turut berperan serta dalam penyelamatan lingkungan terutama kelestarian hutan. Seperti yang diungkapkan Ketua KMPPH dalam wawancara tanggal 29 Januari 2012 pukul 09.00 yaitu sebagai berikut:

“Didirikannya kelompok masyarakat ini memang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam berbagai program pengijauan. Kami para anggota kelompok menginginkan agar lingkungan di sekitar tetap terjaga, hutan kembali hijau dan melestarikan mata air di Kota Batu”

4. Hubungan kerjasama antara pemerintah KLH Kota Batu dengan masyarakat sudah lama terjalin. Selain itu, komunikasi dan interaksi antara staff KLH Kota Batu dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik. Oleh karena itu proses kerjasama lebih mudah dilakukan.

5. Faktor Penghambat Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Terdapat tiga faktor yang menjadi penghambat dalam sinergi yang dijalin antara Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas, yaitu:

1. Struktural

Faktor struktural merupakan faktor dari pemerintah sendiri dan adanya kepentingan-kepentingan politik. Pemerintah yang enggan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai dinas/pihak terkait dengan upaya konservasi mata air Sumber Brantas. Pemerintah hanya memikirkan dari segi pembangunan semata, seperti pembangunan wilayah Kota Batu yang mengorbankan ruang wilayah hijau. Disamping itu banyak faktor-faktor politik yang turut menghambat proses konservasi mata air Sumber Brantas, yakni kepentingan-kepentingan investor yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan lingkungan. Dari kepentingan inilah, pemerintah justru membiarkan segala pembangunan berlangsung secara baik. Regulasi/aturan hukum yang belum jelas menyebabkan segala jenis pelanggaran dalam pembangunan terus dilakukan.

2. Kultural

Faktor kultural merupakan faktor dari budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya penyelamatan lingkungan terutama kelestarian mata air Sumber Brantas. Masyarakat lebih mementingkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup saat ini, daripada memikirkan bagaimana keselamatan dari lingkungan terutama sumber daya air di masa mendatang. Adanya masyarakat

yang menjadi provokator kepada warga lainnya agar tidak mau melakukan kegiatan bersama dalam konservasi mata air Sumber Brantas.

3. Profesionalitas

Dinas-dinas/instansi terkait dalam proses konservasi mata air Sumber Brantas kurang peduli seperti misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar sektor telah menjadi penghambat demi tercapainya proses konservasi sumber daya air.

B. Analisis

1. Kota Batu

Menurut sejarahnya Kota Batu sudah terkenal sejak abad ke IX akhir Masehi, sebagai Kota Wisata karena keindahan pemandangan alamnya. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Karena keindahan alam dan iklim yang mendukung, tidak heran jika Kota Batu berkembang dengan cepat. Di satu sisi, perkembangan perekonomian dilakukan, namun di sisi lain dengan mengorbankan keselamatan lingkungan. Berbagai pembangunan dilakukan di Kota Batu, hal ini menyebabkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu semakin berkurang dan jumlah hutan mengalami degradasi.

Kota Batu menyimpan berbagai kekayaan sumber alam termasuk sumber daya air. Terdapat 138 sumber mata air yang terletak di Kota Batu, salah satunya adalah mata air Sumber Brantas. Ketersediaan sumber-sumber mata air yang cukup potensial dikonsumsi oleh masyarakat Kota Batu sendiri dan sekitarnya.

2. Mata Air Sumber Brantas

Keunggulan Batu terletak pada gunung, hutan dan air penyangga kawasan Hulu Brantas. Luas hutan di Kota Batu menempati separuh lebih dari keseluruhan wilayahnya. Kelestarian hutan keunggulan spesifik itu kini semakin terancam akibat dampak meluasnya praktik alih peruntukan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Semakin berkurangnya hutan di dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air berpengaruh terhadap debit Sungai Brantas. Kebutuhan air bersih ini mengalami penurunan drastis secara kualitas maupun kuantitas dari hulu ke hilir.

Tabel 4.4. Tata guna lahan dan kondisi hutan

No.	Peruntukan lahan	Luas (ha)	Ratio (%)	Keterangan
1	Sawah	2.528,00	12,70	Semakin sempit
2	Pekarangan	1.573,83	7,90	Semakin sempit
3	Kebon/Tegalan	2.55,74	12,58	Kesuburan berkurang
4	Hutan	11.227,40	56,40	Luas dan kelembatan berkurang
5	Lain-lain*	2.021,75	10,15	Semakin meningkat
	Jumlah	19.908,72	100	

Keterangan *): Pemukiman, Jalan, Sungai, dll

Sumber data: *Buku Batu Dalam Angka Tahun 2008*

Berdasarkan tabel 4.4. Semakin berkurangnya hutan di dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air berpengaruh terhadap debit Sungai Brantas. Kebutuhan air bersih ini mengalami penurunan drastis secara kualitas maupun kuantitas dari hulu ke hilir. Semakin berkurangnya daerah persawahan, pekarangan, kebon/tegalan telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan sumber daya air di kota Batu. Semuanya dikorbankan demi

pembangunan ekonomi masyarakat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang.

Tabel 4.5. Tata Guna lahan Kota Batu

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luasan (Ha)
1	Permukiman	1.436,87
2	Perdagangan dan jasa	121,83
3	Pergudangan	43,27
4	Perindustrian	54,09
5	Fasilitas umum	132,06
6	Kawasan militer	79,05
7	Kawasan wisata	81,17
8	Ruang terbuka hijau	144,12
9	Pertanian	11.265,64
10	Hutan	6.550,61
	Jumlah	19.908,72

Sumber data : RTRW Kota Batu 2010-2030

Berdasarkan tabel 4.5. Tingkat pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi dan pembangunan ekonomi yang signifikan juga membuat kebutuhan air semakin meningkat. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan semakin berdampak pada memburuknya kondisi hutan. Banyaknya pembangunan di bidang sektor riil seperti perumahan, *mall*, pabrik dan *retail-retail modern* lainnya. Selain berdampak pada memburuknya kondisi hutan juga berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau. Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyebabkan langkanya ketersediaan air tanah. Jumlah pepohonan yang berkurang berdampak pada polusi udara semakin meningkat, tergusur oleh kepentingan pembangunan kota.

Kondisi lingkungan di kawasan hulu DAS Brantas terutama di kawasan mata air Sumber Brantas semakin memprihatinkan. Selain ancaman deforestasi di kawasan hutan juga terdapat masalah pelik lainnya yaitu degradasi lahan terutama di lereng perbukitan. Sistem pengolahan lahan yang tidak mengindahkan konservasi, menjadi penyumbang besar terhadap erosi dan sedimentasi. Lahan perbukitan yang hampir sudah *gundul* itu merupakan ladang sayur dengan tanaman kentang, wortel dan kubi. Pola pengolahan lahannya tidak terasering tetapi teras miring sehingga permukaan tanahnya mudah larut bila tergerus air hujan. Para petani pemilik lahan enggan melakukan terasering karena sengaja dibirkan agar airnya bisa cepat larut dan tuntas. Tidak diinginkan ada air tersisa di tanah karena kentang dan jenis sayur lainnya dapat busuk terkena genangan air. Dapat dikatakan bahwa faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, seperti perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Bencana banjir, longsor dan kekeringan yang merupakan bukti dari degradasi lingkungan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.

Hutan yang menyelimuti lereng pegunungan di kota Batu memiliki arti yang sangat penting sebagai hutan perlindungan mata air (permata) Hulu sungai Brantas yang mengalir ke 17 kota/kabupaten di Jawa Timur. Di kota Batu terdapat 111 sumber air dengan kondisi dan penyebaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel 4.6, dari 111 sumber mata air Brantas Kota Batu kini yang memproduksi hanya tinggal 50 persennya saja. Kondisi sumber-sumber air semakin terancam, mengalami penurunan debit air dan sebagian mati.

Berdasarkan inventarisasi Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada tahun 2009, jumlah sumber mata air di Kota Batu sebanyak 111 buah. Rinciannya 57 buah terletak di Kecamatan Bumiaji, 32 buah terletak di Kecamatan Batu dan sisanya sebanyak 22 terletak di Kecamatan Junrejo. Dari jumlah tersebut, hanya 13 buah yang memiliki jumlah debit air > 50 lt/dt. Sisanya sebanyak 98 sumber mata air jumlah debit airnya <50 lt/dt. Kondisi tersebut diprediksi menjadi salah satu penyebab daerah hulu rawan terjadi longsor dan mengakibatkan sedimentasi ke Sungai Brantas.

Tabel 4.6. Jumlah sumber mata air di Kota Batu

Menurut wilayah Administrasi	Kec. Bumiaji	57
	Kec. Batu	32
	Kec. Junrejo	22
	Total	111
Menurut kawasan Kepemilikan	Perhutani (Tahura 35 di Bumiaji)	30
	Rakat	41
	Negara	36
	Masyarakat	1
	Tanpa keterangan	3
Total	111	
Menurut debit Air	< 50 liter/detik	13
	>50 liter/detik	98
	Total	111
Menurut Pemanfaatan	Belum dimanfaatkan	6
	Sudah dimanfaatkan	105
	Total	111

Sumber data: Dinas SDAE tahun 2005

Namun setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data terbaru mengenai jumlah mata air. Dari data inventarisasi mata air wilayah Dinas Sumberdaya Air dan Energi kota Batu tahun 2011 ditemukan sumber mata air baru dan sekarang terdapat 138 sumber mata air. Rinciannya 35 buah terletak di Kecamatan Batu, 78 buah terletak di Kecamatan Bumiaji dan 25 buah terletak di

Kecamatan Junrejo. Dari jumlah tersebut hanya 14 buah mata air yang mengeluarkan jumlah debit air >50 lt/dt. Sisanya sebanyak 124 buah sumber mata air jumlah debit airnya <50 lt/dt. Banyak juga sumber mata air dalam keadaan kritis karena hanya mengeluarkan debit hanya 2 sampai 3 liter/detik seperti Sumber Coban Ketak, Sumber Bulu, Sumber Klemuk, Sumber Watugupik dan masih banyak lagi mata air yang kondisinya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepedulian pemerintah maupun masyarakat terhadap lingkungannya masih rendah.

Untuk mata air Sumber Brantas sendiri keadaannya jelek, indikatornya adalah debit air yang keluar dari mata air ini sudah berkurang tidak seperti masa sebelumnya 12 liter/detik sekarang hanya mampu menghasilkan 2,5 liter/detik. Secara kualitas air tetap bagus tetapi secara kuantitas debitnya terus menurun. Hal ini dikarenakan disekitar mata air jumlah hutan sudah berkurang dan sistem penataan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi. Karena mata air Sumber Brantas sangat penting fungsinya dalam menjamin kelangsungan hidup bukan hanya di Kota Batu tetapi bagi seluruh masyarakat di 14 kabupaten/kota, oleh karena itu mata air Sumber Brantas perlu dikonservasi keberadaannya.

3. Governance

a. Peran pemerintah

Dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah tidak boleh memandang air hanya sebagai komoditas ekonomi tetapi perlu mempertimbangkan fungsi sosialnya. Bahwasannya dari segi ekonomi pemerintah

harus dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan tidak kekurangan air pada musim kemarau dan tidak terjadi bencana longsor atau banjir pada saat musim penghujan. Dari segi sosial yaitu terjalinnya hubungan yang dijalin pemerintah dengan masyarakat yang salah satunya dilakukan untuk melestarikan sumber daya air yang ada.

Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk dalam usaha penyelamatan sumber daya air. Interaksi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada kepentingan dan tujuan yang sama. Komunikasi dan interaksi harus dibangun dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena yang dikedepankan dalam proses *governance* bukan efisiensi atau efektifitas kerjanya melainkan pola interaksi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam prinsip *Good Governance*, hubungan *stakeholder* sangat dibutuhkan baik segi *state*, *private* maupun *civil society*. Dalam hal konservasi mata air Sumber Brantas, pihak swasta jarang sekali turut andil dalam upaya pelestarian karena memang mata air Sumber Brantas tidak digunakan/dimanfaatkan secara langsung oleh untuk kepentingan swasta. Mata air Sumber Brantas memang benar-benar dilindungi dan hanya digunakan untuk kepentingan irigasi. Pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan masyarakat sebagai pengguna langsung aliran dari mata air Sumber Brantas juga harus peduli terhadap kelestariannya. Oleh karena itu peneliti lebih memfokuskan pada hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat saja

dengan tidak mengenyampingkan sektor swasta sebagai salah satu unsur *Governance*.

Melihat dari prinsip-prinsip *Good Governance* bahwasannya pemerintah belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga dan melestarikan keselamatan sumber daya air. Beberapa prinsip *Good Governance* yaitu:

1. *Visionary*, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Dalam hal ini artinya pemerintah harus berpikir ke depan mengenai dampak yang akan ditimbulkan apabila pembangunan terus dilakukan tanpa adanya keseimbangan untuk menjaga kelestarian alam. Pemerintah harus mempunyai program dan strategi yang jelas dalam konservasi sumber daya air terutama mata air Sumber Brantas. Dan segala bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus disosialisasikan kepada masyarakat agar antara pemerintah dan masyarakat sama-sama mengerti dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air khususnya mata air Sumber Brantas.
2. *Responsibility*, pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelestarian sumber daya air. Pemerintah dituntut untuk mampu mengayomi dan memfasilitasi segala kegiatan berkaitan dengan pelestarian mata air Sumber Brantas. Karena air merupakan kebutuhan vital manusia yang harus dipenuhi untuk

kemakmuran hidupnya. Berkaitan juga dengan segala pembangunan di sektor riil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga harus bertanggung jawab apabila pembangunan terus dilakukan akan berdampak pada terancamnya kelestarian lingkungan.

3. *Responsiveness*, pemerintah yang responsif sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian sumber daya air. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelestarian sumber daya air menyangkut banyak faktor dan banyak aktor, sehingga jika pemerintah tidak tanggap dengan permasalahan yang ada, maka permasalahan yang terjadi akan semakin rumit.
4. *Professionalism*, sikap profesionalisme dari pemerintah sangat diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pemerintah tidak boleh merasa sebagai pihak yang paling berwenang, tetapi juga pemerintah harus dapat mengoptimalkan peran masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungannya.
5. Sekretariat pengembangan publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda) menyatakan salah satu prinsip dalam wacana *Good Governance* yaitu Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*), bahwasannya bukan hanya pembangunan fisik yang harus dipikirkan oleh pemerintah untuk menjadikan sebuah wilayah menjadi lebih maju melainkan juga memikirkan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen. karena daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkenali. Sekarang ini berbagai dampak pembangunan telah kita rasakan, seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, pencemaran lingkungan yang semakin tidak terkendali, kekeringan di

beberapa wilayah pada saat musim kemarau dan lain sebagainya. Segala jenis pembangunan dilakukan untuk keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang. Membuat peraturan/regulasi yang jelas merupakan bentuk dari komitmen pemerintah terhadap lingkungannya. Aturan ini tentunya mengenai bagaimana mengatur keseimbangan antara pembangunan tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistemnya, pemerintah KLH Kota Batu telah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan. Program-program tersebut yaitu vegetativ, civil teknis, terasering dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya dapat merusak lingkungan. Namun, berbagai program tersebut belum tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan kerjasama antar instansi dan tingkat kepedulian masyarakat yang kurang serta belum adanya regulasi/aturan yang jelas mengenai keharusan untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kabag. Hukum Setda Kota Batu dalam wawancara (Selasa, 13 Desember 2011) mengatakan bahwasannya memang tidak ada landasan hukum yang mendasari proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan KLH Kota Batu sebagai *leading sector* tidak mengajukan permohonan kepada bagian Hukum Pemkot Batu untuk dibuatkan sebuah peraturan. Jadi, apabila pemerintah KLH Kota Batu melakukan kerjasama dengan

masyarakat atas inisiatif sendiri meskipun belum ada regulasi yang mengatur mengenai sinergi pemerintah masyarakat dalam konservasi sumber daya air.

Pihak Pemkot sendiri saat ini juga belum mempunyai kebijakan mengenai penyelamatan lingkungan hidup. Akhirnya dari DPRD Kota Batu mengusulkan inisiatif kepada Pemkot Batu Bagian Hukum untuk membuat produk kebijakan mengenai penyelamatan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut sudah dibuat namun masih dalam bentuk kerangka/*draft* Perda. Rencananya awal tahun 2012 baru akan dibahas mengenai Perda lingkungan hidup.

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat 3 menyebutkan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang diantaranya adalah:

- a) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- c) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan dan peraturan perUndang-Undangan;
- e) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- f) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

- g) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- h) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah kabupaten/kota Batu melimpahkan kewenangannya kepada dinas/instansi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Dalam pengelolaan sumber daya air telah terdapat landasan hukum yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diharapkan dapat memenuhi tujuan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum atas pengelolaan sumber daya air, baik air permukaan, air bawah tanah, maupun air diatas permukaan

Adanya kepastian hukum yang jelas mengenai pengelolaan sumber air akan lebih memberikan jaminan terselenggaranya proses konservasi secara baik. Kepastian hukum ini juga akan memberikan sanksi yang jelas apabila ada pelanggaran terhadap hal-hal yang sifatnya dapat merusak lingkungan.

- 2) Membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keadilan seluruh masyarakat

Pengembangan wilayah Sungai Brantas dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dengan sistem pengelolaan yang terpadu berlandaskan

pengertian bahwa wilayah sungai merupakan satu kesatuan hidrologis (*one river, one plan, one integrated management*) yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

- 3) Sebagai landasan sistem pengelolaan sumber daya air yang seimbang antara eksploitasi (pendayagunaan) dan konservasi (pelestarian)

Sumber daya air tidak hanya dieksploitasi terus-menerus tetapi juga harus dipikirkan proses konservasinya. Permasalahan sumber daya air membutuhkan penanganan yang serius. Dari temuan data mengenai sumber mata air terbaru, meskipun ada mata air baru yang ditemukan namun ternyata masih banyak sumber mata air yang terus mengalami penurunan debit. Hal ini menunjukkan bahwasannya belum ada keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi. Hal inilah yang harus ditumbuhkan pada setiap individu bahwasannya keselamatan lingkungan terletak pada kesadaran kita untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan.

- 4) Sebagai landasan sistem pengelolaan sumber daya air terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada negara federasi. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat (Maharani, 2004). Hal ini berkaitan dengan *point* nomer 3, bahwasannya pemerintah daerah berhak untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya air tetapi juga harus dipikirkan konservasinya.

- 5) Membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang demokratis, transparan serta mengakomodasi peran masyarakat.

Pemerintah tidak boleh merasa sebagai pihak yang paling berwenang. Posisi pemerintah dan masyarakat harus dalam keadaan horizontal atau sejajar agar tidak ada yang merasa paling superior. Komitmen politik dari pemerintah sangat penting dan harus disertai upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui komunikasi dan mobilisasi semua bagian masyarakat

Pemerintah KLH Kota Batu menyadari bahwasannya peran masyarakat sangatlah penting guna menunjang program dari pemerintah. Karena memang bukan saatnya pemerintah yang paling berkuasa, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan. Oleh karena itu program “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat” ini merupakan program yang sangat bagus sekali dan perlu dikembangkan serta dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah KLH Kota Batu harus lebih intensif lagi melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar semakin banyak yang turut serta menjaga mata air. Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungannya. Terdapat beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya air, yaitu

1. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara nasional dilakukan secara terencana dan berkelanjutan

Untuk menjaga kelestarian sumber daya air dibutuhkan rencana, strategi dan program yang jelas agar masing-masing mata air tidak sampai menurun debitnya apalagi mati. Penyelamatan mata air Sumber Brantas harus dilakukan secara *continue* dan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Brantas masih bersifat jangka pendek.

2. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang bersifat spesifik harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan tetap berdasar satuan wilayah daerah pengaliran
3. Pendayagunaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dan konsultasi pada masyarakat disetiap tingkat dan mendorong pada tumbuhnya komitmen bersama antar pihak terkait (*stakeholder*)

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu (multi sektor), menyeluruh, berkelanjutan, berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan wilayah sungai sebagai kesatuan pengelolaan

4. Pendayagunaan sumber daya air yang berhasil memerlukan komitmen untuk mengembangkan dan pengelolaan secara berkelanjutan dengan pemantuan, evaluasi dan penelitian pada berbagai tingkat untuk menjawab secara efektif kebutuhan yang berkembang di tingkat nasional, proyek, daerah layanan dan wilayah administratif.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Dimana air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelestarian mata air Sumber Brantas di Kota Batu. Pendekatan masyarakat (*community based*) dalam implementasi teknologi konservasi mata air Sumber Brantas perlu untuk dikembangkan. Sehingga diharapkan masyarakat akan semakin peduli dan berperan aktif dalam melestarikan sumber daya air.

b. Peran Masyarakat

Sesuai dengan jenis pemerintahan Indonesia saat ini yaitu demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya masyarakat mempunyai peran yang sama-sama penting dengan pemerintah. Pembangunan *good governance* dalam menuju Indonesia masa depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan *civil society* untuk memperbesar partisipasi berbagai warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Civil Society merupakan kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Pemerintah mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan membuat regulasi dalam konservasi mata air Sumber Brantas sedangkan masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam setiap rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur pasal 6 *point* 2 “Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam menjaga kualitas air pada sumber-sumber air”. Jadi masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga agar jangan sampai mata air Sumber Brantas tercemar, berkurang debitnya apalagi mati. Masyarakat juga harus memaksimalkan perannya dalam usaha konservasi mata air Sumber Brantas, seperti misalnya menanam pohon di sekitar area rumah,

pengurangan penggunaan pupuk kimia karena akan mempengaruhi kualitas air dan penggunaan air secara bijaksana.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara adil, keberlanjutan dan bijaksana. Seperti dalam konservasi mata air Sumber Brantas, apabila pemerintah melakukannya sendiri meskipun mempunyai program dan finansial yang cukup hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, masyarakat mempunyai keinginan untuk menjaga sumber daya air tetapi tidak punya apa-apa terutama dukungan finansial. Oleh karena itu, masyarakat membuka peluang dan terbuka terhadap program kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah. Antara pemerintah yaitu KLH Kota Batu dengan masyarakat Desa Sumberbrantas dan Kelompok Masyarakat Pecinta Hutan (KMMPH) bersinergi dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas yang bertujuan untuk menyelamatkan sumber daya air di Jawa Timur. Pelibatan masyarakat dalam aktivitas merupakan merupakan indikator tercapainya *good governance*.

Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam upaya penyelamatan sumber daya air melalui kegiatan konservasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan pentingnya peran masyarakat dalam konservasi sumber daya air:

1. Bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

2. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
3. Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
4. Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.

Selain itu disebutkan pula dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Bab IX Peran Serta Masyarakat pasal 37 menyebutkan:

1. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna
2. Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Sesuai dengan salah satu prinsip yang paling mendasar dalam *Good Governance* yaitu partisipasi. Dalam hal ini, masyarakat secara keseluruhan telah berpartisipasi dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Masyarakat Desa Sumberbrantas telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga mata air Sumber Brantas. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelompok

masyarakat yang terdiri dari petani-petani Desa Sumberbrantas yang berdiri pada tanggal 15 September 2009. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah terbentuknya rantai ekonomi perdesaan yang semakin kuat dengan landasan Budidaya Pertanian yang aman, menguntungkan dan selaras dengan Alam. Jadi para anggota Gapoktan Sumber Brantas menginginkan agar warga dalam bertani tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dapat merusak alam, karena yang paling berhubungan dengan mata air Sumber Brantas adalah petani yang menggunakan alirannya untuk keperluan irigasi. Gapoktan dan juga perangkat Desa Sumberbrantas mengundang warga desa ke dalam suatu pertemuan dalam rangka melakukan sosialisasi agar dalam bertani melakukan hal-hal yang sesuai dengan kaidah konservasi. Gapoktan mengadakan rapat setiap satu minggu sekali. Dan mengadakan rapat pertemuan dengan warga setiap satu bulan sekali dengan berbagai agenda acara seperti sosialisasi pemamfaatan Rumah Kompos agar tidak merusak kualitas mata air, sosialisasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan cara memberikan bantuan kredit bibit tanaman seperti kopi dan kesemek kepada petani miskin dan sosialisasi rehabilitasi lahan miring dan pengendalian erosi tanah.



Gambar 4.9. Pertemuan Gapoktan dengan warga desa
Sumber: Sekretaris Gapoktan Desa Sumberbrantas

Kelompok Masyarakat Pecinta Lingkungan Hutan (KMPPH) merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai tekad dan keinginan untuk menyelamatkan lingkungan terutama kelestarian hutan. KMPPH mempunyai program-program yang telah direncanakan dengan baik dengan para anggota, baik itu program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwasannya kelompok masyarakat ini memang benar-benar peduli terhadap kelestarian lingkungan dan hutan di Kota Batu.

c. Sumber Daya Air Kota Batu

Sumber daya air merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang pemanfaatannya diusahakan secara bijaksana agar kebutuhan dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Potensi sumber daya air suatu wilayah adalah salah satu faktor penting di dalam menunjang kehidupan manusia. Kota Batu merupakan kawasan wisata yang terletak di daerah dataran tinggi yang

menyimpan banyak sekali mata air. Mata air adalah suatu titik di mana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah, yang berarti dengan sendirinya adalah suatu tempat di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah (Wikipedia). Keberadaan hutan di daerah Kota Batu sudah semakin berkurang. Mata air berasal dari air hujan yang disimpan oleh pohon-pohon yang nantinya keluar menjadi mata air. Namun, luas hutan di Kota Batu semakin lama semakin menurun. Berkurangnya jumlah hutan ini banyak dilakukan oleh penebang liar illegal di beberapa tempat, hal ini menyebabkan terjadi penurunan debit sumber air dan sungai dan penurunan kesuburan tanah akibat erosi. Mengingat posisi Kota Batu dalam konteks regional merupakan kawasan tangkapan air dan hulu Sungai Brantas yang melayani wilayah lainnya di Jawa Timur, terganggunya komunitas hutan di kota ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup besar bagi wilayah lainnya.

Beberapa permasalahan juga terjadi seperti banyak kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan konservasi beralih fungsi menjadi kawasan terbangun terutama untuk perumahan (antara lain sekitar sungai dan daerah perbukitan/terjal). Hal ini selain berakibat pada menurunnya fungsi kawasan, juga sangat rentan terhadap timbulnya bencana-bencana seperti longsor, erosi, penurunan fungsi tanah dan lain-lain. Kota Batu dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadikan Kota Wisata Batu sebagai daerah yang maju baik dari segi pariwisata maupun pertaniannya. Hal ini menimbulkan dilema antara mengembangkan wisata atau konservasi penyelamatan lingkungan. Bahwasannya di Kota Batu telah berdiri berbagai bangunan seperti hotel, industri, perumahan

dan retail-retail modern lainnya. Jika kemudian industri wisata yang bersifat kapitalistik tidak mampu dikontrol melalui kebijakan pemerintah niscaya upaya konservasi air dan lahan hutan penjaga air akan kalah karena laju industri pariwisata selalu tidak sebanding dengan rumitnya melakukan konservasi sumber daya air baik karena kendala sistem tanam atau budaya masyarakat sekitar mata air dalam menggunakan sumber air untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Perkembangan Kota Wisata Batu yang begitu cepat telah menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan serius terhadap kelangsungan sumber daya air. Permintaan akan pelayanan sumber daya air akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Meskipun di Kota Batu kaya akan sumber mata air namun pada kenyataannya masih banyak sumber mata air yang semakin hari debitnya semakin menurun. Sungai Brantas menjadi penghidupan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di 14 kabupaten/kota. Karena mata air Sumber Brantas merupakan mata air pertama yang mengalir di sungai Brantas. Dan berdasarkan RTRW Kota Batu tahun 2003-2013 mata air Sumber Brantas merupakan kawasan lindung yang harus dipikirkan strategi dan konservasinya. Dalam pelaksanaannya juga diharapkan ada kerjasama yang baik antara *state, private and civil society (stakeholder)* dalam satu kesatuan paradigma pengembangan wilayah.

d. Sinergi Yang Terjalin Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka melestarikan mata air Sumber Brantas. Kedua pihak ini harus bekerjasama sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam bersinergi harus menerapkan beberapa prinsip dasar berikut agar sinergi yang dibentuk bisa memberikan hasil yang optimal, yaitu:

1. Kesiediaan untuk saling berbagi

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Begitu juga dalam konservasi mata air Sumber Brantas pemerintah harus dapat berbagi dengan masyarakat, mengingat permasalahan sumber daya air di Kota Batu semakin kompleks. Apabila pemerintah melakukannya sendiri tanpa melibatkan peran masyarakat maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, masyarakat mempunyai keinginan namun tidak ada dukungan dari pemerintah maka segala aspirasi dan keinginan tidak akan berjalan.

2. Berfikir meneng

Dalam melakukan kerjasama tidak ada istilah ada yang salah satu pihak yang paling berkuasa. Kedua belah pihak dalam posisi yang horizontal/sejajar. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan, namun tetap saja dalam hal konservasi mata air Sumber Brantas masyarakat juga harus dilibatkan. Pelibatan masyarakat ini harus dimulai dari pembuatan program/kebijakan sampai dengan evaluasinya.

3. Menghargai perbedaan

Pemerintah dan masyarakat adalah dua golongan yang berbeda, namun bukan berarti pendapat masing-masing patut dipertahankan secara egois serta perlu adanya sikap saling menghargai.

Melihat esensi dari pengertian konservasi sudah terlihat bahwasannya upaya memelihara apa yang kita punya secara bersama-sama. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat melakukan secara bersama-sama upaya konservasi mata air Sumber Brantas. Penguatan peran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkuat basis sumber daya. Tipe kemitraan sinergis berbasis pada kesadaran, saling membutuhkan dan saling mendukung pada masing-masing pihak yang bermitra sangat dibutuhkan. Sinergi akan timbul jika dua tindakan atau lebih dilakukan secara bersama-sama untuk menimbulkan suatu hasil yang lebih besar dibandingkan jika dilaksanakan secara individu.

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas termasuk jenis kemitraan mutualistik. Kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi/kelompok atau lebih yang memiliki yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kerjasama bidang konservasi sumber daya air sama-sama diuntungkan. Bagi pemerintah manfaat yang dapat diambil dari sinergi yang terjalin dengan masyarakat adalah tercapainya program yang telah dirumuskan karena ada bantuan tenaga dari masyarakat yang peduli atas keselamatan sumber daya air. Dan bagi masyarakat manfaat yang bisa diambil dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mata air Sumber Brantas untuk dilestarikan agar terus dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi di masa mendatang. Selain itu, dari proses penghijauan dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas ini juga menguntungkan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan bibit tanaman yang diberikan oleh KLH Kota Batu merupakan tanaman yang secara ekonomi menguntungkan masyarakat yaitu bibit pohon apel, pisang, kesemek, alpukat, dll.

Manfaat bagi mata air Sumber Brantas sendiri yaitu:

1. Terjaganya kualitas air yang keluar dari mata air sumber brantas (kualitas tidak menurun)
2. Terjaganya jumlah/volume air yang keluar dari sumber mata air Sumber Brantas (kuantitas tidak menurun)
3. Karena air merupakan “sumber kehidupan” maka dapat dinyatakan juga dengan terjaganya kualitas dan kuantitas air yang keluar dari sumber mata air baik yang di sumber brantas maupun semua mata air di Kota Batu adalah

“terjaganya” kelangsungan kehidupan manusia/warga Kota Batu dan juga warga di 17 kabupaten /kota yang di aliri sungai brantas

4. Terjaganya persediaan air baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun pengairan pertanian

Bahwasannya permasalahan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Karena jika pemerintah saja yang melaksanakan program sebaik apapun atau dengan dukungan dana yang sangat besar namun tidak akan berarti dan dapat saja program akan gagal tidak dapat dilaksanakan karena pelaksananya adalah masyarakat. Atau sebaliknya masyarakat melakukan perlindungan mata air namun pemerintah mempunyai kebijakan yang sifatnya dapat merusak (misalnya mendatangkan investor untuk mengambil dan menjual air) sumber mata air maka tetap saja sumber mata air di sumber brantas akan rusak.

Dalam Undang-Undang RI No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 menyebutkan bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan atas asas:

1. Tanggung jawab Negara
2. Partisipatif
3. Kearifan lokal

Hal ini menunjukkan bahwasannya negara bertanggung jawab atas segala permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Negara dalam hal ini

melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya (desentralisasi). Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pelimpahan wewenang diatur kembali yang tertuang dalam PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kemitraan yang terjalin antara KLH Kota Batu dengan masyarakat Desa Sumberbrantas dan KMPPH berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari berbagai program dan kegiatan penghijauan yang dilakukan bersama-sama diberbagai wilayah di Kota Batu. Dari program penghijauan yaitu “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat” merupakan bukti bahwasannya antara pemerintah dan masyarakat telah berkerjasama dengan baik. KMPPH telah lama bermitra dengan KLH Kota Batu dalam berbagai kegiatan penghijauan yang dilakukan. Sebelum organisasi KMPPH terbentuk secara hukum, para anggota tergabung dalam kelompok Relawan Lingkungan (Reli) yang secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KLH Kota Batu.

Dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas dilakukan bersama-sama dengan masyarakat mulai dari program sampai dengan evaluasinya. Jadi, antara pemerintah KLH Kota Batu dengan Masyarakat Desa Sumberbrantas

memiliki kesepahaman visi, misi dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga tidak ada pihak yang merasa paling berwenang dan tidak ada pihak yang pasif. Dalam implementasi program penghijauan yaitu Penanaman Hutan Pendidikan dan Penguatan Mata Air di sekitar Sumber Brantas sebagian staff KLH Kota Batu terlibat langsung. Dalam setiap pertemuan dengan pemerintah KLH Kota Batu, masyarakat memberikan penjelasan mengenai kondisi lingkungan di sekitar, saran dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan penghijauan yang baru saja dilakukan oleh KLH Kota Batu bersama-sama dengan pihak terkait seperti FK MPL, KMPPH, Koramil Batu dan peneliti yang turut terlibat langsung yaitu pada tanggal 29 Januari 2012 di sepanjang Jalan Sultan Agung menuju Balai Kota Batu. Sebanyak 450 pohon yang ditanam yang terdiri dari pohon Kenari, Trembesi, Mauni dan Ketapang. Biaya bibit tananam ditanggung oleh KLH Kota Batu dengan perincian Rp. 3000/pohon yang dibeli melalui tempat pembibitan. Terlihat bahwasannya para KLH Kota Batu beserta pihak terkait yang terlibat langsung kegiatan penghijauan bekerjasama dengan baik, mereka bergotong royong dan saling membantu.

Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan perumusan program sampai dengan konsevasinya sangatlah dibutuhkan. Karena pemerintah KLH Kota Batu sendiri akan lebih mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang sebenarnya dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas khususnya. Jadi, antara pemerintah dan masyarakat tidak ada yang merasa paling disuperioritaskan tetapi sama-sama saling mengisi demi tujuan yang diharapkan yaitu menyelamatkan sumber daya air.

Kemitraan yang dijalankan akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan, secara teori beberapa hal yang akan dihasilkan dari proses kemitraan antara lain:

1) Meningkatkan sumber daya

Dalam hal ini adalah sumber daya alam yaitu mata air Sumber Brantas dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Apabila mata air Sumber Brantas di konservasi maka akan dapat meningkatkan debit mata airnya yang yang dulunya mampu menghasilkan 12 liter per detik kini hanya 2,5 liter per detik. Dari aspek sumber daya manusia yaitu pemerintah dapat memperbaiki segala program dan kebijakan untuk konservasi sumber daya air lebih baik lagi.

2) Untuk membangun kapasitas lokal untuk tindakan dan kontrol oleh masyarakat setempat dan pemangku kepentingan

Dalam konservasi mata air Sumber Brantas sangatlah dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat lokal. Untuk program dirumuskan KLH Kota Batu dan proses implementasi oleh KLH Kota Batu bersama-sama dengan masyarakat. Dan evaluasi terhadap hasil konservasi yang dilakukan, juga oleh masyarakat setempat dan KLH Kota Batu.

3) Untuk menghindari konflik, membuat keyakinan dan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat

Sungai yang melintasi lebih dari satu wilayah administratif seperti kabupaten atau kota selalu memiliki potensi konflik. Ketersediaan air permukaan selalu berubah-ubah, tergantung kepada musim dan kemampuan mengelola prasarana pengendalian air. Pasokan air untuk irigasi cenderung berkurang karena

digunakan untuk keperluan lain seperti industri dan keperluan domestik. Semakin terbatasnya ketersediaan air irigasi akan memicu konflik antara petani di bagian hilir dan bagian hulu. Oleh karena itu, apabila mata air Sumber Brantas di konservasi dapat mengurangi potensi konflik. Karena mata air Sumber Brantas merupakan mata air pertama untuk aliran sungai Brantas. Dalam konservasi ini masyarakat dilibatkan sebagai salah satu *stakeholder*. Hal ini dapat meningkatkan meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Cara menjaga agar hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tetap terjaga adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan cara melakukan pertemuan untuk membahas program-program yang telah dan akan dilakukukan. Seperti yang dijelaskan Ketua RW Desa Sumberbrantas dalam hasil wawancara (16 November 2011) menyatakan bahwa:

“Agar hubungan kerjasama ini tetap berjalan dengan baik yaitu pihak KLH harus dapat membangun komunikasi dengan masarakat. Setidaknya, ada pembicaraan mengenai bagaimana penghijauan penghijauan itu tetap terlaksana demi kelangengan mata air.”

Karena mata air Sumber Brantas merupakan sumber mata air yang langsung bermanfaat untuk masyarakat sekitar, maka pemerintah yaitu KLH Kota Batu harus mampu menjaga kerjasama dan merubah pola pikir masyarakat agar paling tidak, masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih merusak lingkungan di sekitar mata air.

Masih banyak yang harus dipikirkan dan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konservasi mata air Sumber Brantas ini seperti bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya air. Bukan

hanya pemerintah saja yang berusaha, seluruh masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat sekitar mata air Sumber Brantas juga harus mempunyai usaha keras dalam melestarikan sumber daya air. Lebih baik mencegah dan mengantisipasi berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari kerusakan sumber daya air. Antipasti terhadap dampak seperti banjir dan kekeringan akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan diskusi berkepanjangan saat bencana datang. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Walaupun domain kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan, namun upaya kerjasama kemitraan dengan masyarakat juga perlu dijalin.

4. Faktor Pendukung Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

a. Dengan adanya kelompok masyarakat yang peduli akan keselamatan lingkungan terutama keselamatan hutan di Kota Batu telah membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kelompok masyarakat ini mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan dan menjadikan hutan di Kota Batu kembali hijau. Anggota kelompok baik dari Gapoktan dan KMPPH selalu berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa peduli masyarakat terhadap keselamatan lingkungan.

b. Tumbuhnya rasa peduli terhadap lingkungan yang masih terjaga di kalangan masyarakat merupakan hal penting agar kelestarian mata air Sumber Brantas tetap terjaga. Dan sikap terbuka dan sambutan baik yang ditunjukkan oleh

masyarakat apabila ada program kerja sama dari pemerintah dalam upaya konservasi mata air harus tetap dipertahankan.

c. Dengan adanya keinginan yang kuat dari para anggota kelompok untuk terlibat langsung dalam segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah merupakan faktor pendukung dalam melakukan sinergi dengan pemerintah dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas.

d. Hubungan kerjasama antara pemerintah KLH Kota Batu dengan masyarakat sudah lama terjalin. Hal ini dikarenakan adanya hubungan saling membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, komunikasi dan interaksi antara staff KLH Kota Batu dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik.

5. Faktor Penghambat Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumber Brantas

a. Struktural

Merupakan faktor intern dari pemerintah sendiri. Pemerintah cenderung mendukung berbagai pembangunan yang ditujukan untuk kemajuan wilayahnya tetapi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan kepada kelestarian lingkungan. Kurang adanya koordinasi dari masing-masing pihak/dinas terkait dikarenakan masing-masing memiliki kepentingan sendiri yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonomi ini telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien.

Selain itu, belum adanya regulasi/aturan yang jelas mengenai bagaimana konservasi itu dilakukan dan aturan mengenai sanksi terhadap segala jenis pelanggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat. bahwasannya tingkat kepedulian pemerintah terhadap keselamatan lingkungannya masih rendah. Penyelamatan lingkungan terutama sumber daya air tidak cukup hanya dari satu pihak saja. Tetapi dibutuhkan kerjasama yang sinergis antar dinas/instansi terkait dengan penyelamatan sumber daya air, seperti Dinas Kehutanan, Dinas pengairan, Dinas pertanian.

b. Kultural

Kurangnya kesadaran dari masyarakat ini merupakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan upaya pelestarian sumber daya air. Masyarakat lebih mementingkan upaya memperoleh penghasilan tanpa melakukan upaya pelestarian lingkungan. Masyarakat seharusnya tidak hanya mementingkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga memikirkan bagaimana agar mata air Sumber Brantas tidak berkurang debitnya apalagi mati. Artinya, masyarakat tidak hanya menanam sayur mayur tetapi juga bisa menanam pohon yang akarnya lebih kuat agar dapat menahan erosi. Dan juga masyarakat harus melakukan perubahan terhadap kegiatan yang sifatnya dapat merusak lingkungan seperti meminimalisir penggunaan pupuk kimia karena dapat mempengaruhi kualitas air.

Pemerintah dalam memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat dinilai kurang adil, masyarakat yang sudah mampu justru diberi bibit sedangkan

masyarakat yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan bibit tanaman. Hal inilah mungkin yang menyebabkan adanya beberapa orang yang menjadi provokator tidak mau untuk melakukan kerjasama dalam konservasi mata air. Sikap-sikap tidak mau mendukung dan tidak peduli yang menyebabkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Setiap individu seharusnya sadar akan pentingnya untuk menjaga mata air Sumber Brantas. Karena bagaimanapun juga yang merasakan akibatnya apabila mata air Sumber Brantas berkurang debitnya yaitu masyarakat sendiri. Bukan hanya masyarakat Desa Sumberbrantas tetapi juga masyarakat di 14 kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kelangngan mata air sangatlah dibutuhkan.

c. Profesionalitas

Kurangnya koordinasi yang baik antar dinas dan instansi terkait telah menyebabkan upaya konservasi tidak dapat berjalan secara maksimal. Mata air Sumber Brantas dikelola oleh beberapa dinas/instansi seperti Jasa Tirta I Malang, UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo (Cangar), Perum Perhutani KPH Malang, KLH Kota Batu. Dan di antara dinas/instansi ini belum bekerjasama untuk menyelamatkan mata air Sumber Brantas. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak mempunyai kewenangan dan apa yang harus dilakukan diwilayahnya. Bahwasannya untuk menyelamatkan sumber daya air, tidak dapat dilakukan secara personal tetapi komprehensif oleh seluruh *stakeholders* dan dilakukan menyeluruh dari hulu sampai hilir. Permasalahan yang semakin kompleks inilah

yang menuntut agar pemerintah dapat bekerjasama dengan baik terutama dengan masyarakat agar hasil yang dicapai maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengenai sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka konservasi mata air Sumber Brantas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa mata air Sumber Brantas merupakan mata air yang sangat vital keberadaannya dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air masyarakat di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur. Karena mata air Sumber Brantas merupakan mata air pertama yang mengalir di sungai Brantas. Pemerintah KLH Batu sebagai *leading sector* telah melakukan secara maksimal tugasnya untuk senantiasa menjaga hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan lingkungan hidup. Untuk upaya konservasi mata air Sumber Brantas sendiri KLH Batu telah melakukan kegiatan konservasi yaitu vegetatif, civil teknis, terasering dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya dapat merusak lingkungan. Pemerintah KLH Batu juga melakukan pengamatan atau *survey* dan pengujian kualitas air yang keluar dari mata air Sumber Brantas.

Melihat salah satu prinsip *Good Governance* yaitu partisipasi, masyarakat Desa Sumberbrantas dan KMPPH Kota Batu telah berpartisipasi dengan baik dalam menjaga mata air Sumber Brantas dengan menanam pohon di sekitar area

arboretum dan secara aktif ikut terlibat langsung dalam berbagai program penghijauan bersama-sama dengan pemerintah KLH Batu.

Saat ini, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas telah berjalan dengan baik. KLH sendiri menyadari bahwasannya masyarakat memang perlu untuk dilibatkan dalam konservasi mata air Sumber Brantas. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melakukan kerjasama untuk penghijauan dan sosialisasi lahan terasseing dengan program “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat”. Kemitraan ini termasuk dalam model kemitraan mutualistik karena antara pemerintah dan masyarakat sama-sama memperoleh keuntungan. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat juga memberikan dampak positif bagi sumber daya air Kota batu yaitu mata air yang awalnya berjumlah 111, kini bertambah menjadi 138 mata air. Untuk mata air Sumberbrantas kondisinya juga membaik, hal ini dikarenakan bertambahnya hutan disekitar mata air Sumber Brantas. Secara tidak langsung, dengan hutan yang lebat kembali dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas mata air. Hutan mempunyai peranan yang penting karena hutan merupakan penyangga utama bagi keberadaan mata air.

2. Faktor pendukung dan penghambat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya sumber daya manusia sebagai motivator yakni masyarakat cinta lingkungan yang turut berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya air

- 2) Masyarakat bersikap terbuka terhadap segala program kerjasama dari pemerintah KLH Batu
- 3) Keinginan dan tekad dari para anggota untuk turut berperan serta dalam penyelamatan lingkungan terutama kelestarian hutan.
- 4) Hubungan kerjasama antara pemerintah KLH Batu dengan masyarakat sudah lama terjalin. Selain itu, komunikasi dan interaksi antara staff KLH Batu dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik.

b. Faktor Penghambat

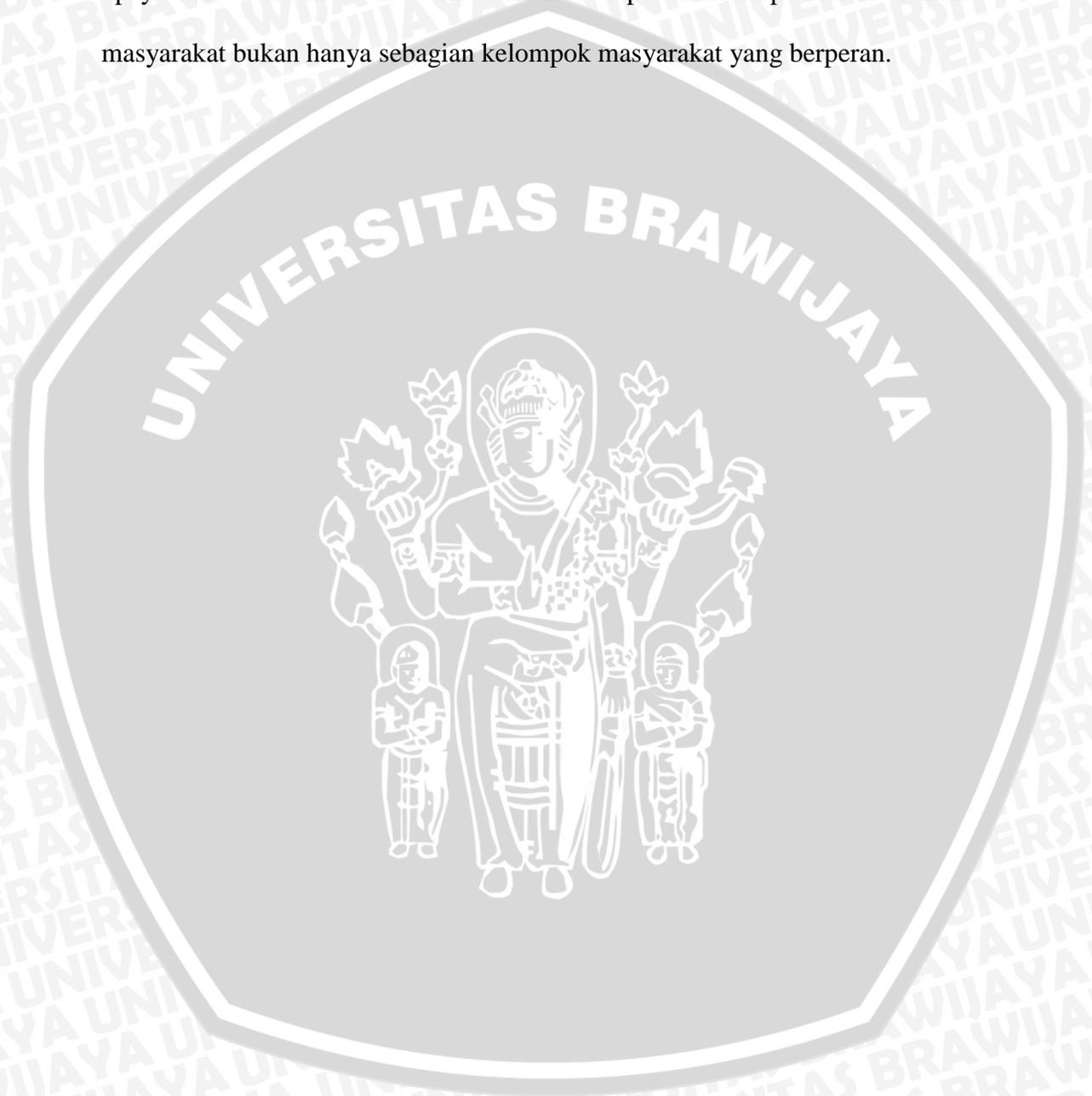
- 1) Struktural
- 2) Kultural
- 3) Profesionalitas

B. Saran

Kota Batu sebagai kawasan penyangga utama hulu Brantas perlu diadvokasi secara terus-menerus untuk memperkuat kesadaran ekologi masyarakat. Keterpanggilan masyarakat sangat penting untuk bersama-sama dengan pemerintah bangun bergerak mewujudkan kepedulian terhadap kelestarian Brantas. Sungai Brantas merupakan aset Jawa Timur yang mengalir ke 17 kabupaten/kota yang berawal dari Kota Batu. Oleh karena itu, peneliti sendiri memiliki saran-saran yang diharapkan mampu membantu sinergi ini agar tetap berjalan, diantaranya adalah:

1. Pemerintah harus memiliki tanggung jawab dan lebih responsif menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan terutama keselamatan sumber daya air.
2. Pemerintah harus mempunyai *political will* yang kuat, *political budget* tinggi dan aturan/regulasi yang jelas yang mendukung dalam upaya konservasi mata air Sumber Brantas. Dukungan kebijakan, aturan dan hukum di dalam mengelola sumber daya air khususnya tindakan konservasi sumber daya air akan memberikan jaminan masyarakat akan hak atas air dan kewajibannya dalam mengelola dan menggunakan air secara bijaksana. Sehingga diharapkan masyarakat akan semakin peduli dan berperan aktif dalam melestarikan sumber daya air.
3. Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya sangat diperlukan. Oleh karena itu, masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang sesuai dengan kaidah konservasi. Seperti menjadikan lahan mereka yang sebelumnya teras miring menjadi terasseing, menanam “tumpang sari” di sela-sela tanaman yang berguna untuk menahan laju air dan mengurangi penggunaan pupuk pestisida yang dapat berpengaruh terhadap kualitas air.
4. Pemerintah dan masyarakat harus dapat menjaga komunikasi dan interaksi secara berkala. Dengan jalannya komunikasi dan interaksi maka hubungan kerjasama keduanya akan semakin baik pula. Karena penyelamatan sumber daya air tidak dapat dilakukan hanya sekali atau dua kali dalam kerja sama, namun penyelamatan sumber daya air harus dilakukan secara *continue*/berkesinambungan.

5. Pemerintah harus melakukan pendekatan masyarakat (*community based*) dalam implementasi teknologi konservasi mata air. Hal ini dilakukan agar upaya konservasi mata air Sumber Brantas dapat mencakup seluruh elemen masyarakat bukan hanya sebagian kelompok masyarakat yang berperan.



DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, H. 2006. *Makna Dan Esensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pendayagunaan SDA*. Monado: HATHI cabang Bandung.

Arif, S. Sigit. 2003. *Merenungkan Kembali Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan*. Jakarta: FAO Bappenas.

Basuki, Ananto dan Shofwan.2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD).

Brinkerhoff, W. Derick and Benjamin L.Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concept and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. USA: Kumarian.

----- . 2005. *Daftar peraturan Perundang-undangan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Sumber Daya Air (Dilengkapi Dengan Potensi dan Kebutuhan Air Rumah Tangga, Pemanfaatan Air Untuk Energi, Bisnis Air Minum Dalam Kemasan, Sektor Lain dan Permasalahannya)*. Jakarta: PT Visi data Riset Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim.2009. *Konservasi Mata Air Harus Segera Dilakukan*. Diakses pada Tanggal 30 April 2011 dari www.jatimprov.go.id

Hollifield dan Jillson. 2000. *Pathways to Democracy, The Political of Democratic Transitions*. Diakses tanggal 30 April 2011.

<http://id.wikipedia.org>. 2010. *Mata Air*. Diakses pada tanggal 30 September 2011.

<http://.wikipedia.org>, 2008. *Pengertian Organisasi Perangkat Daerah*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2012

<http://www.wisegeek.com>. 2008. *What is governmentality*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2012

<http://wartapedia.com>. 2009. *Lingkungan konservasi krisis air sungai Brantas sisakan 53 mata air*. Diakses pada tanggal 30 April 2011.

Iskandar, J. 2000. *Kerusakan Lingkungan*. Warta Kehati. Terbitan Juni–Juli. Edisi Dwiwulanan issn No. 1410 – 0304.

Kawasan Kutan Lindung DAS Brantas Hanya Tersisa 60 ha. 2009. Diakses pada Tanggal 18 April 2011 dari <http://lintasjatim.com/daerah>.

Kodoatie, J. Robert. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

----- dan Syarif, R. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Maharani, Laila. 2010. *Otonomi Daerah*. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2011 dari <http://lailamaharani.blogspot.com>.

Mandar, Agus et al. 2004. *Konsensus Sebagai Pilar Utama Good Governance Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singgigi Provinsi Riau*. Vol. XI hal 40-46 Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.

Marsiatanti, Yusi. 2011. *Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Topeng Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.

Mcdoank. 2010. *Krisis Regulasi Malang Raya sebagai kawasan hulu DAS Brantas*. Diakses pada Tanggal 18/04/2011 dari www.mcdoank.wordpress.com.

Nurfatriani, Fitri. *Pengelolaan Kawasan Hutan Di Bagian Hulu DAS Brantas Hulu: Sebagai Pengatur Tata Air*. Diakses pada Tanggal 18 April 2011 dari <http://konservasimataairsumberbrantas.com>.

Patilima, H. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Podungge, Robiyati, 2009. *Sinergi DPRD Dan Walikota Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.

Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.

Sarwoko, Adidan Imam Anshori. 2006. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan*. Jakarta: Departemen Kimpraswil.

Shapira P. Krassimira. 2009. *Innovative Partnership for effective Governance of sustainable Urban Tourism* Institute for Technology Assessment and System Analysis Forschungszentrum Karlsruhe. Germany.

Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subagyono, Kasdi. 2004. *Bagaimana Memasyarakatkan Konservasi Air*. Diakses pada Tanggal 18/04/2011 dari <http://partisipasi.masyarakatdalamkonservasi.sda.com>.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suhady Idup, dan Fernanda. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Suharti, T. 2004. *Pengelolaan Sungai, Danau dan Waduk Untuk Konservasi Sumber Daya Air*. Makalah Pribadi Falsafah Sains Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sunaryo, M. Triet *al.* 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Malang: Bayu Media Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang *Sumber Daya Air*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 3 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 3 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Utomo, Tri Widodo. 2008. *Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten Bandung)*.

Winarso, Heru Pudji. 2004. *Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Malang: Kominet Press.

Yusgiantoro, Purnomo. 2003. *Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dapat Mengatasi Krisis Air*. Diakses pada Tanggal 20/04/2011 dari <http://menteri.esdm.go.id/index.php>.





PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA SUMBERBRANTAS

Jl. Raya Sumberbrantas No: 71 telpon (0341)- 511055 Kecamatan Bumiaji Kota Batu 65336

SURAT PENGANTAR

Nomor : 072/ 15 /422.330. 9/ 2011

Universitas Brawijaya Malang Menunjuk Surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 April 2011
Nomor : 3377/UN.10.3/PG/2011 Perihal Riset.

Dengan ini kami mengijinkan kegiatan di wilayah Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kepada :

N a m a : **RIZKA FEBRIANI**
NIM : 0810310350
Fakultas / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang
Tempat Kegiatan : Desa Sumberbrantas
Tema Kegiatan : Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Konservasi Mata Air Sumberbrantas Kota Batu
Lamanya Kegiatan : 2 Bulan (19 September – 19 Nopember 2011)
Jumlah peserta : 1 Orang

Dengan ketentuan :

Mentaati ketentuan yang berlaku di tempat Penelitian / Kegiatan
Sesampai di tempat Penelitian / Kegiatan, agar melapor dan minta petunjuk kepada pejabat / petugas setempat.
Setelah selesai mengadakan Penelitian / Kegiatan supaya melapor kembali kepada Pejabat Desa dan petugas setempat.

Sumberbrantas, 27 Oktober 2010

KEPALA DESA SUMBERBRANTAS
Sekretaris

ROERNOMO BOEDJONO

Tembusan disampaikan :

Kepada Yth. 1.Sdr. Kepala Dusun Jurang Kual; 2.Sdr. Kepala Dusun Krajan; 3.Sdr. Kepala Dusun Lemah Putih; 4.Rektor Universitas Brawijaya Malang; 5. Arsip.





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Jl. M. SAHAR NO. 35 - Telp (0341) 595734
BATU 65314

SURAT KETERANGAN

No. 660/ 066 /422.206/2012

Bersama ini menerangkan nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rizka Febriani
NIM : 0810310350
Jurusan / Fakultas : Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Benar – benar telah melaksanakan Penelitian untuk skripsi di Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATU



Drs. MUHLIS, MPd
Pembina
NIP. 19630722 198504 1 002



Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Informan

BLANKO RESPONDEN

Profil Responden

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah :

No. Tlpn/HP :

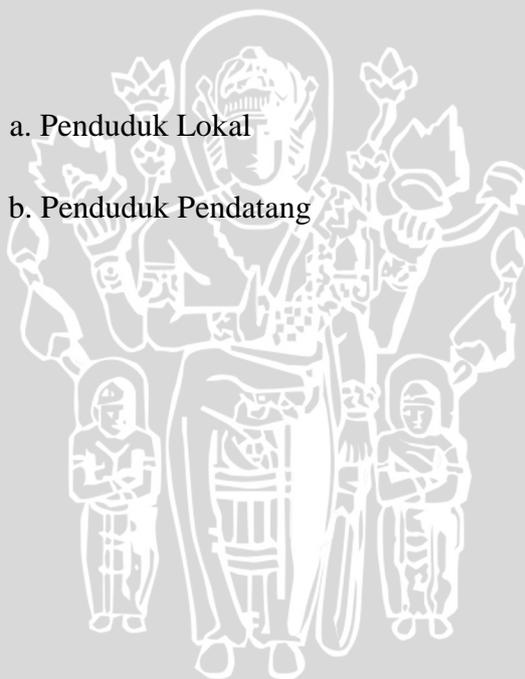
Status Kependudukan : a. Penduduk Lokal

b. Penduduk Pendetang

Pekerjaan :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :



Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Aparatur KLH Batu

1. Menurut Anda, bagaimana kondisi mata air Sumber Brantas saat ini ?!
 - a. Bagus, indikatornya.....
 - a. Jelek, indikatornya.....
2. Apa saja Program yang pernah dilakukan oleh KLH Batu dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
3. Apa saja Program yang akan dilakukan oleh KLH Batu dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
4. Menurut saudara, apa saja manfaat yang didapat jika kita melakukan konservasi sumber daya air terutama mata air Sumber Brantas ?!
5. Apakah KLH Batu bersinergi/melakukan kerjasama dengan masyarakat Ds. Sumber Brantas dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?!
6. Apa saja program yang pernah dilakukan antara KLH Batu dengan Masyarakat ?!
7. Bagaimana cara menjaga agar hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas terus berlangsung dengan baik ?!
8. Menurut saudara, siapa yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya air apakah pemerintah atau masyarakat sekitar mata air Sumber brantas ?!
9. Bagaimanakah seharusnya upaya konservasi mata air itu dilakukan?
10. Apa faktor pendukung dalam melakukan sinergi dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
11. Apa faktor penghambat dalam melakukan sinergi dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
12. Apa harapan saudara mengenai konservasi mata air Sumber Brantas ?!

Daftar Pertanyaan Wawancara Aparatur Pemkot Batu Bagian Hukum

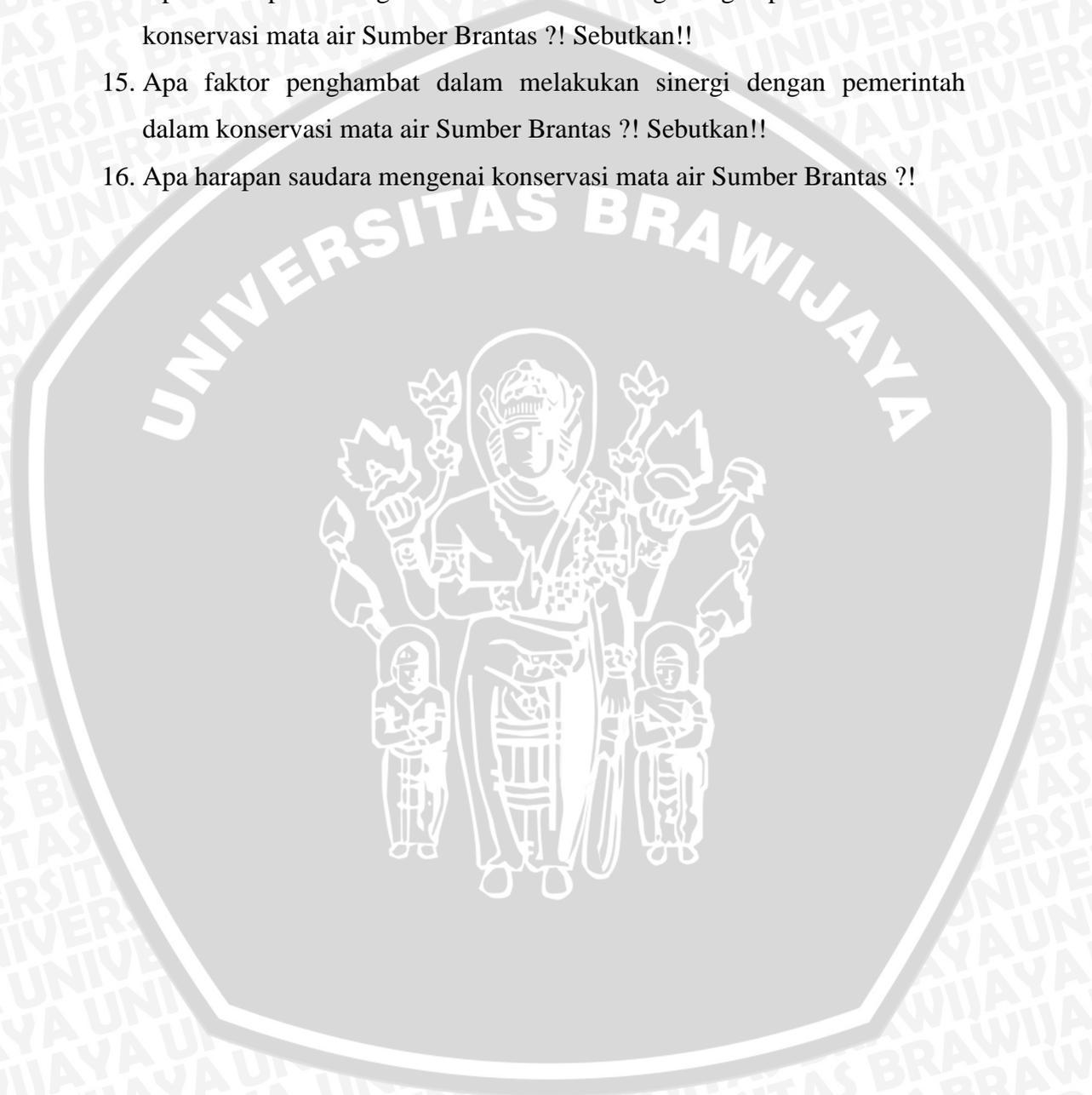
1. Kebijakan apa yang di ambil terkait dengan konservasi sumber daya air terutama mata air Sumber Brantas ?!
2. Bagaimana dengan peraturan/hukum yang jelas mengenai penyelamatan sumber daya air ?!
3. Apa saja program/Renstra dari Pemkot Batu terkait dengan konservasi sumber daya air terutama mata air Sumber Brantas ?!
4. Adakah landasan hukum yang mengatur mengenai sinergi/kemitraan pemerintah dengan masyarakat terkait dengan konservasi sumber daya air ?
5. Menurut saudara, siapa yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya air ?!
6. Apa harapan saudara mengenai konservasi mata air Sumber Brantas ?!



Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat Desa Sumberbrantas, Batu

1. Apa fungsi mata air Sumber Brantas bagi masyarakat?!
2. Menurut Anda, bagaimana kondisi mata air Sumber Brantas saat ini ?!
 - a. Bagus, indikatornya.....
 - b. Jelek, indikatornya.....
3. Apa saja upaya yang pernah Anda lakukan dalam kegiatan konservasi mata air Sumber Brantas ?!
4. Apa saja Program yang pernah dilakukan oleh Ds. Sumber Brantas dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
5. Apa saja Program yang akan dilakukan oleh Ds. Sumber Brantas dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
6. Menurut saudara, apa saja manfaat yang didapat jika kita melakukan konservasi sumber daya air terutama mata air Sumber Brantas ?!
7. Apakah masyarakat Ds. Bumiaji bersinergi/melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?!
8. Apa bentuk dari sinergi yang dijalin antara masyarakat Ds. Bumiaji dengan pemerintah ?!
9. Bagaimana cara menjaga agar hubungan kerjasama dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas terus berlangsung dengan baik ?!
10. Bagi masyarakat, manfaat apa yang bisa di ambil dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?!
11. Menurut saudara, apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?! (terkait dengan usaha pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan)
 - a. Sudah, jelaskan!!
 - b. Belum, jelaskan!!

12. Menurut saudara, siapa yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya air apakah pemerintah atau masyarakat sekitar mata air Sumber brantas ?!
13. Bagaimanakah seharusnya upaya konservasi mata air itu dilakukan?
14. Apa faktor pendukung dalam melakukan sinergi dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
15. Apa faktor penghambat dalam melakukan sinergi dengan pemerintah dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
16. Apa harapan saudara mengenai konservasi mata air Sumber Brantas ?!



**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kelompok Masyarakat
Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH)**

1. Menurut Anda, bagaimana kondisi mata air Sumber Brantas saat ini ?!
 - a. Bagus, indikatornya.....
 - b. Jelek, indikatornya.....
2. Apa saja program yang pernah dilakukan oleh KMPPH dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
3. Apa saja program yang akan dilakukan oleh KMPPH dalam pelestarian mata air Sumber Brantas ?!
4. Apakah Yayasan Pusaka bersinergi/melakukan kerjasama dengan KLH Batu dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?!
5. Apa program yang pernah dilakukan oleh KMPPH bersama-sama dengan KLH Batu terkait dengan konservasi mata air Sumber Brantas ?!
6. Apa saja program yang akan dilakukan KMPPH bersama-sama dengan KLH Batu terkait dengan konservasi mata air Sumber Brantas ?!
7. Berapa kali KMPPH melakukan interaksi dengan KLH Batu dan biasanya membahas soal apa terkait dengan konservasi mata air Sumber Brantas ?!
8. Bagaimana cara menjaga agar hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas terus berlangsung dengan baik ?!
9. Apa faktor pendukung dalam melakukan sinergi dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
10. Apa faktor penghambat dalam melakukan sinergi dengan masyarakat dalam konservasi mata air Sumber Brantas ?! Sebutkan!!
11. Apa harapan saudara mengenai konservasi mata air Sumber Brantas ?!

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. 1 Wawancara dengan Kasi Seksi Pemantauan, Pemulihan, Pengembangan Kapasitas (PPPK)



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ketua Gapoktan Desa Sumber Brantas



Gambar 2.1 Wawancara dengan Sekretaris Gapoktan Desa Sumber Brantas



Gambar 2.2 Wawancara dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KMPPH



Gambar 3. 1 Masyarakat Desa Sumber Brantas Menanam Rumpuk Partiver



Gambar 3.2. Kegiatan penghijauan 29 Januari 2012 oleh KLH Batu, FK MPL, KMPPH, Koramil Batu dan peneliti